

4.2. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

4.2.1. Urusan Pariwisata

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Ketiga** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Sosial adalah sebagai berikut : Jumlah kunjungan wisatawan **493.495 Orang**; Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 6,49%.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Pemasaran pariwisata

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri (mengikuti pameran/expo) dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.135.710.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.132.910.050,- atau 96,87%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pameran expo di 2 daerah/lokasi yaitu di Jakarta pada bulan Maret 2015 dan di Kalimantan pada bulan Oktober 2015. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan promosi pariwisata dalam negeri.
- (2) Kegiatan Penyediaan Materi Promosi Wisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.227.448.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.226.557.840 atau 99,61%. Keluaran dari kegiatan ini adalah menyediakan materi promosi wisata seperti baleho untuk promosi wisata Bintan di Jakarta, Batam dan Tanjungpinang. Selain itu brosur, x banner, map, poster, tas juga telah di siapkan untuk bahan promosi pameran pariwisata di Jakarta dan Kalimantan.
- (3) Kegiatan Familiarization Trip yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.151.630.000 realisasi anggaran sebesar

- Rp.148.997.6650,- atau 98,26%. Keluaran dari kegiatan adalah telah terselenggaranya Familiarization Trip dengan mengundang agen-agen travel perjalanan dari luar daerah. Selain itu untuk memperkenalkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan juga dilibatkan beberapa media masa Nasional dan Internasional.
- (4) Kegiatan Partisipasi Parade Tari Propinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.149.900.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.143.029.250,- atau 95,42%. Pada tahun 2015 pemerintah Kabupaten Bintan telah mengikuti penyelenggaraan Parade Tari yang dilaksanakan oleh Provinsi Kepulauan Riau. Dari hasil penyelenggaraan Parade Tari tersebut sanggar Tuah Pusaka utusan Kabupaten Bintan telah berhasil meraih juara 1 tingkat Provinsi Kepulauan Riau dan berhak untuk menjadi utusan tingkat Nasional.
 - (5) Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Memancing yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.411.150.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.409.022.650,- atau 99,48%. Keluaran dari kegiatan ini adalah telah terlaksananya even pariwisata berupa Lomba Memancing di kecamatan Teluk Sebong (perairan Berakit) pada bulan April tahun 2015. Peserta lomba berasal dari dalam dan luar negeri.
 - (6) Kegiatan Penyusunan Buku Highlight Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.206.458.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.201.631.320,- atau 97,66%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya buku Highlight pariwisata Bintan sebagai bahan informasi promosi wisata.
 - (7) Kegiatan Penyelenggaraan Even Pariwisata (*Tour De Bintan*) yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.917.619.200,- realisasi anggaran sebesar Rp. 496.182.000,- atau 25,87%. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kondisi alam Kabupaten Bintan sedang mengalami kabut asap yang cukup tebal dikarenakan kebakaran hutan di Pulau Kalimantan dan Sumatra, namun beberapa perlengkapan persiapan seperti kegiatan promosi, baju, mendali dan souvenir telah dilaksanakan.

- (8) Kegiatan Penyelenggaraan Event Metaman Bintan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.950.752.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.940.171.950,- atau 98,89 %. Ditahun 2015 Kegiatan ini diganti nama yaitu IRON MAN namun rangkaian acara dan perlombaan masih, Even Iron Man Merupakan salah satu event yang bersekala Internasional yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2015 dengan jumlah peserta ± 650 dari Asia, Eropa, Amerika dan Australia.
- (9) Kegiatan Galery Promosi Bintan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.222.300.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.129.592.607,- atau 58,30%. Keluaran dari kegiatan ini Terlaksananya penyediaan fasilitas galery promosi Bintan di Kawasan Wisata Lagoi. Hasilnya tersedianya sarana promosi pariwisata Bintan di Lagoi.

b. Permasalahan dan Solusi

- a. Kekurangan Anggaran sehingga ada beberapa event tidak dapat terlaksanakan.
- b. Adanya Bencana Alam yaitu Kebakaran Hutan di Kalimantan dan Sumatra sehingga mengakibatkan kabut tebal menyelimuti Kawasan Pariwisata Lagoi.
- c. Adanya Isu Teroris sehingga negara-negara yang memiliki potensi

penghasil wisatawan melakukan travel warning kepada warganya datang ke Indonesia.

- d. Adanya Isu Epidemic (penyakit Menular) dan penyakit saluran Pernafasan yang disebabkan oleh Asap.
- e. Masih belum beroperasinya secara maksimal beberapa usaha pariwisata sehingga belum mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan secara maksimal.

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

a. Pelaksanaan Program

Kegiatan Pemeliharaan Objek / kawasan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.174.600.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.171.286.550,- atau 98,10%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana objek wisata dan benda cagar budaya. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas objek wisata dan benda cagar budaya seperti terpeliharanya kawasan bukit kerang dan objek wisata km 52.

b. Permasalahan dan Solusi

- a. Masih Kurangnya Anggaran untuk Penyediaan Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kawasan Pantai Trikora, Pantai Penepat dan Sakera.
- b. Banyaknya Fasilitas Pendukung Pariwisata yang belum dapat di perbaiki atau di pelihara di karenakan kekurangan anggaran, seperti di Ruang Bilas, Gazebo dan Sarana Out Boand yang berada di Kawasan Gunung Bintan.

3) Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata

a. Pelaksanaan Program

Kegiatan Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPDA) Kabupaten Bintan yang

dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.80.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.79.629.850,- atau 99,54%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Perda tentang RIPPARDA Kabupaten Bintan. Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya 1 Dokumen Payung hukum untuk Perencanaan Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Pembangunan Pariwisata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata hal ini perlu di tambah dengan pengembangan program kegiatan ekonomi kreatif bagi masyarakat di sekitar objek wisata.

2) Solusi

- a. Melakukan perencanaan-perencanaan yang matang untuk pengembangan objek wisata dan berusaha agar pendanaan untuk melakukan kegiatan Pengembangan Objek wisata dan kegiatan promosi wisata dapat di tingkatkan.
- b. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk menambahkan destinasi wisata melalui upaya-upaya promosi dalam dan luar negeri.
- c. Berkoordinasi dengan kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata provinsi Kepri dan Dinas Pekerjaan Umum untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah kawasan wisata melalui program pengembangan desa wisata.
- e. Menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pihak swasta dalam penyelenggaraan event-event bertaraf internasional seperti event Tour de Bintan, Kite Surfing, Metaman dan Triathlon.

- f. Membentuk lembaga-lembaga pariwisata dan budaya untuk mendukung kegiatan kepariwisataan.
- g. Mengali potensi pariwisata yang dimiliki dengan menginventarisir dan merevitalisasi benda-benda sejarah, seni dan budaya yang di miliki Kabupaten Bintan.

4.2.2. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Ketiga** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Sosial adalah sebagai berikut : Jumlah Produksi perikanan tangkap mrncapai **54.464 Ton**

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

a. Pelaksanaan Program

Kegiatan Fasilitasi Kemitraan antara Nelayan dan Pengusaha dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.84.180.000,- dan realisasi sebesar Rp.83.863.975,- atau 99,62%. Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya 40 teknis pengolah dan pemasar.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.5.629.965.300,- dan realisasi sebesar Rp.5.461.304.550,- atau

97,00%. Hasil kegiatan ini adalah Tersedianya sarana dan prasarana 78 unit kapal penangkap ikan, 9.954 alat tangkap dan 650 unit sarana pendukung.

- (2) Kegiatan Operasional DAK Bidang Perikanan Tangkap dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.248.585.300,- dan realisasi sebesar Rp.235.698.370,- atau 94,82 %. Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya operasional penunjang kegiatan DAK Tangkap seperti jasa konsultan pengawasan untuk pekerjaan pengadaan kapal dan sosialisasi kepada penerima bantuan sarana penangkapan ikan sebanyak 24 kelompok nelayan.
- (3) Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Bidang Perikanan Tangkap (Pendampingan Percepatan Penerbitan Kartu Nelayan) dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.54.279.200,- dan realisasi sebesar Rp.53.534.600,- atau 98,63%. Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya 1.000 kartu nelayan.
- (4) Kegiatan Operasional DAK Bidang Perikanan Tangkap dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.4.328.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.4.247.500.000,- atau 98,14 %. Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya sarana dan prasarana 12 unit kapal motor gillnet, 240 piece gillnet multi filament, 4 unit kapal motor rawai, 4 basket rawai, 12 unit GPS dan 12 unit fish finder serta 16 unit fiber box.
- (5) Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Bidang Perikanan Tangkap (Monitoring dan Evaluasi Distribusi BBM bagi Nelayan) dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp. 35.529.200,- dan realisasi sebesar Rp. 32.761.600,- atau 92,21 %. Hasil kegiatan ini adalah Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi distribusi BBM.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Struktur armada penangkapan yang masih pincang, dimana sekitar 90% masih merupakan nelayan tradisional.
- b. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penangkapan, seperti: prasarana TPI/PPI dan sarana alat penangkapan ikan.
- c. Usaha kelautan dan perikanan masih dianggap beresiko dan kurang menguntungkan, sehingga kurang mendapatkan dukungan permodalan usaha yang memadai.

2) Solusi

- d. Untuk itu perlu dilakukan restrukturisasi armada penangkapan; akselerasi pengembangan perikanan tangkap, rasionalisasi usaha perikanan tangkap, pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan.
- e. Solusi pemecahan masalahnya dilakukan pembangunan PPI/TPI secara bertahap melalui penyempurnaan sarana dan prasarana. Sebagai tahap awal telah dilakukan studi kelayakan pelabuhan dan rencana rinci pembangunan pelabuhan perikanan dan pengembangan alat tangkap.
- f. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka telah dicanangkan Gerakan Nelayan Bintang Menabung dimana DKP didampingi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintang kedepan akan diberikan kredit bunga rendah melalui Kredit Usaha Rakyat Kelautan Perikanan (KUR-KP), Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Subsidi Benih.

3) Program Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pengembangan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

dengan alokasi anggaran Rp.200.300.000,-dengan realisasi sebesar Rp.182.158.170,- atau 90,94%. Hasil dari kegiatan ini adalah Memperkenalkan keanekaragaman masakan berbahan baku ikan melalui lomba masak menu serba ikan yang diikuti oleh 20 peserta utusan dari masing-masing kecamatan dan 100 buku menu masakan serba ikan.

- (2) Kegiatan Pengembangan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Fasilitasi sertifikat Unit Pengolahan Ikan) dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.41.807.000,- dengan realisasi sebesar Rp.36.678.650,- atau 87,73%. Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya 10 Sertifikat UPI di Kabupaten Bintan.
- (3) Kegiatan Pengembangan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Review UKL-UPL) dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.45.278.000,- atau 90,56 %. Hasil dari kegiatan ini adalah Optimalisasi pabrik es (pembangunan dengan sumber dana APBD Provinsi Kepulauan Riau) di Kelurahan Kawal, yaitu pemasangan teralis dan kanopi dan Tersedianya 1 Dokumen lingkungan UKL UPL pabrik es Kawal.
- (4) Kegiatan Pengembangan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Penyusunan DED Pabrik ES Tanjung Uban) dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.60.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.52.518.000,- atau 87,53%. Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya 1 dokumen perencanaan (DED) pabrik es Tanjung Uban.

b. Permasalahan dan Solusi

Belum adanya dukungan permodalan yang memadai untuk pengembangan subsektor perikanan dan lemahnya penguasaan pasar (*market intelligence*) hal ini ditandai menurunnya pendapatan masyarakat nelayan.

4) Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan (Operasional dan Pendampingan Program *Coral Triangle Inintiation* (CTI)) dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.620.935.000,- dan realisasi sebesar Rp.606.237.709,- atau 97,63%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya areal konservasi dan perlindungan sumberdaya perikanan dan kelautan sebagai pendamping kegiatan rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang, mangrove dan seagrass di 3 kecamatan dan 9 desa MMAS.
- (2) Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan (Operasional dan Pendampingan Konservasi Dugong) dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.166.550.000,- dengan realisasi sebesar Rp.162.851.855,- atau 97,78%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya areal konservasi dan perlindungan sumberdaya perikanan dan kelautan sebagai pendamping kegiatan dugong, seagrass dan ekosistem terkait di 6 Kecamatan.
- (3) Kegiatan Konservasi dan Perindungan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan (Konservasi Penyu) dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.194.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp.184.615.010,- 95,06%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpeliharanya areal konservasi dan perlindungan sumberdaya perikanan dan kelautan sebagai pendamping kegiatan pengelolaan penyu dan ekosistem terkait di 2 Kecamatan.
- (4) Kegiatan Konservasi dan Perindungan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan (Konservasi Kuda Laut) dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.205.030.000,- dengan

realisasi sebesar Rp.199.506.470,- 97,31%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpeliharanya areal konservasi dan perlindungan sumberdaya perikanan dan kelautan di 2 Kecamatan.

- (5) Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Lautan (Pembangunan Depot Pemasaran Air Bersih) dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.91.225.000,- dengan realisasi sebesar Rp.81.477.000,- atau 89,31%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya 1 unit sarana dan prasarana air bersih di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (6) Kegiatan Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.46.330.000,- dengan realisasi sebesar Rp.45.922.230,- atau 99,12 %. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data pelaku usaha perikanan dan 400 izin usaha perikanan.
- (7) Kegiatan Operasional Pelayanan Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.52.410.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 52.349.400,- atau 99,88 %. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 dokumen data kapal yang sudah ditandai dan didaftarkan.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Budidaya Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.890.685.000,- dengan realisasi

sebesar Rp.876.417.300,- atau 98,40%. Hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya produksi benih perikanan budidaya air tawar dan laut sebanyak 30%.

- (2) Kegiatan Penanggulangan Monev Hama Penyakit Ikan dan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.30.235.000,- dengan realisasi sebesar Rp.29.992.500,- atau 99,20%. Hasil dari kegiatan ini adalah penanggulangan hama dan penyakit ikan sebesar 80%.
- (3) Kegiatan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana pembudidaya Ikan (Pengadaan Sarana dan Prasaranaan Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Air Laut) dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.814.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.807.542.845,- atau 99,21%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya produksi budidaya perikanan air tawar dan laut sebesar 30%.

b. Permasalahan dan Solusi

Adanya ketimpangan pemanfaatan stock ikan antara kawasan Pantai Barat yang sudah "*over fishing*" dibandingkan dengan Kawasan Pantai Timur dan Utara Bintan yang pemanfaatannya belum optimal, termasuk kawasan ZEE laut Cina Selatan yang masih sedikit disentuh oleh nelayan Bintan. Sehubungan dengan itu dilakukan alih usaha nelayan ke usaha budidaya KJA (Kerapu).

6) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Perikanan (Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Perikanan) dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.136.565.000,- dengan realisasi sebesar Rp.97.853.340,- atau 71,65%. Hasil dari kegiatan ini terwujudnya Tertib administrasi dokumen 100 pelaku usaha perikanan.

- (2) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantauan Kapal Perikanan (DAK pengawas) dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.1.424.040.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.398.196.000,- atau 98,19%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya fungsi pengawasan kelautan dan perikanan sebesar (40%).
- (3) Kegiatan Penyusunan DED Kapal Pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.44.995.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.066.850,- atau 93,49%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 Dokumen DED Kapal Pengawasan.
- (4) Kegiatan Operasional DAK Bidang Pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.78.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.64.931.500,- atau 83,25%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya pengawasan Kelautan dan Perikanan.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4.2.3. Urusan Pertanian

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Ketiga** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Sosial adalah sebagai berikut : Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB **5,73%**; Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar **31,5 Ton/Ha**. Nilai tukar petani **98,99%**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Peningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura berkelanjutan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Pengembangan Bibit Tanaman Hortikultura dan Peningkatan produk unggulan Daerah Keluaran dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.158.423.549,- dan realisasi sebesar Rp.158.143.250 atau 99,82%. output dari kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan pengelolaan dan produk unggulan daerah untuk 3 varietas salak dan pengadaan sarana pupuk dan obat-obatan untuk peningkatan jumlah produksi tanaman Hortikultura. Bahwa telah ditetapkan varietas unggulan baru salak dari Kabupaten Bintan yaitu " Sari Intan" yang merupakan kepanjangan dari "SALAK RESEARCH INSTITUTE OF FRUIT BINTAN" ada 3 varietas yang telah dilepas, yaitu: SARI INTAN 48 (SK Mentan No. 3510/KPTS/SR.120/10/ 2009 Tanggal 12 Oktober 2009), SARI INTAN 295 (SK Mentan No. 3511/KPTS/SR.120/10/2009 Tanggal 12 Oktober 2009) dan SARI INTAN 541 (SK Mentan No.3512/ KPTS/SR.120/10/2009 Tanggal 12 Oktober 2009). Saat ini Populasi Salak Sari Intan di Balai Benih Kabupaten (BBK) sebanyak 397 pohon dengan perincian sebagai berikut: Sari Intan 48 sebanyak 13 pohon, Sari Intan 295 sebanyak 98 pohon, dan Sari Intan 541 sebanyak 286 pohon. Selain itu, kegiatan ini juga berupaya untuk meningkatkan jumlah tanaman Hortikultura di BBK yang nantinya akan disebar/dihibahkan kepada masyarakat yaitu Bibit tanaman Manggis, Jambu air madu, Kedondong Mini, Sirsak dan Pupuk serta beberapa alat-alat pertanian/ pengolahan pertanian berupa gunting stek, polybag dan tanah hitam.

- **Potensi tanaman pangan dan hortikultura Bintan**

Luas wilayah Kabupaten Bintan 88.038,54 Km², namun luas daratannya hanya 2,21 % (1.946,13 Km²) atau 194.613 Ha. Pembangunan pertanian yang didalamnya mencakup sektor tanaman pangan dan hortikultura memiliki potensi pengembangan Tanaman Pangan dan hortikultura seluas ±14.754 Ha, sedangkan yang telah diusahakan ±6.635 Ha. Komoditas yang telah dikembangkan meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan cabe, kacang panjang, timun, terung, bayam kangkung dll (sayuran), dan durian, manggis, rambutan, salak dll (buah – buahan), dengan pertumbuhannya cukup baik dan sangat potensial. Potensi untuk tanaman padi seluas ±1.050 Ha dan yang telah diusahakan ±40 Ha yaitu di Parit Bugis Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan seluas ± 28 ha sedangkan di Poyotomo Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong seluas ±12 Ha. Potensi Palawija seluas ±2.278 Ha dan yang telah diusahakan ± 681 Ha. Potensi sayuran seluas ± 5.362 Ha dan yang telah diusahakan seluas ±1.574 Ha. Potensi Buah – buahan seluas ±6.063 Ha dan yang telah diusahakan seluas ± 3.119 Ha. Berikut potensi dan luas lahan yang telah diusahakan potensi pengembangan dan luasan areal yang telah diusahakan :

Tabel 4.46 : Potensi lahan pertanian untuk komoditas Padi, Palawija, Sayur – sayuran dan Buah–buahan di Kabupaten Bintan Tahun 2015

No	Kecamatan	Padi (Ha)		Palawija (Ha)		Sayur – Sayuran (Ha)		Buah – Buahan (Ha)		Jumlah (Ha)	
		Potensi Lahan	Yang telah diusahakan	Potensi Lahan	Yang telah diusahakan	Potensi Lahan	Yang telah diusahakan	Potensi Lahan	Yang telah diusahakan	Potensi Lahan	Yang telah diusahakan
1	Teluk Bintan	450	21	226	125	700	496	659	228	2.035	870
2	Bintan Utara	10	-	328	44	392	140	533	209	1.263	365
3	Teluk Sebong	290	-	322	37	897	528	957	616	2.466	365
4	Seri Kuala Lobam	60	-	154	48	365	52	749	141	1.328	241
5	Bintan Timur	80	-	250	55	768	410	695	445	1.378	910
6	Gunung Kijang	120	-	250	79	426	199	562	391	2.018	669
7	Mantang	-	-	115	8	39	6	238	20	340	34
8	Bintan Pesisir	-	-	120	2	314	110	310	191	555	303
9	Toapaya	40	-	439	260	1.316	1.013	1.095	782	2.890	2.055
10	Tambelan	-	-	74	23	146	78	265	96	481	197
	Jumlah	1.050	21	2.278	681	5.362	3.032	6.063	3.119	14.754	6.008

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan, tahun 2016

- **Komoditi padi dan palawija**

Komoditi padi yang telah dikembangkan seperti Padi rawa varietas Inpara 3, Inpara 2 dan Inpara 5 sedangkan untuk jenis lokal Varietas lembu sawah. Komoditi palawija yang telah dikembangkan seperti Ubi kayu jenis sapat, udang dan kuning, ubi jalar, jagung, kedelai, kacang tanah, talas sedangkan kacang hijau, dan ganyong, hanya sedikit sekali sedang gandum dan sorgum tidak ada sama sekali.

Keadaan luas tanam, panen dan produksi Padi, Jagung dan kedelai pada tahun 2015 dapat dilihat seperti tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.47 : Luas tanam , luas panen dan produksi padi, jagung dan kedelai Kabupaten Bintan tahun 2015

No.	Kecamatan	JENIS KOMODITI								
		Padi			Jagung			Kedelai		
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)
1	Teluk Bintan	21	15	315	55	52	854	-	-	-
2	Bintan Utara	-	-	-	7	7	65	-	-	-
3	Teluk Sebong	-	-	-	16	14	125	-	-	-
4	Seri Kuala Lobam	-	-	-	12	9	98	-	-	-
5	Cunung Kijang	-	-	-	16	15	150	-	-	-
6	Bintan Timur	-	-	-	35	32	352	-	-	-
7	Bintan Pesisir	-	-	-	3	3	24	-	-	-
8	Mantang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Toapaya	-	-	-	135	132	1.482	-	-	-
10	Tambelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TH. 2014		21	15	315	279	264	3.120	0	0	0
TH. 2014		17	41	528	275	223	2.396	5	5	
TH. 2013		40	40	1.480	490	170	2.480	5	5	
TH. 2012		62	61	1.470	973	386	2.480	1	1	
TH. 2011		62	61	1.470	1.928	538	2.480	1	1	

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan , tahun 2016

Catatan : * Panen muda tidak termasuk dalam tanaman pangan.

Perkembangan luas tanaman palawija diwilayah Kabupaten Bintan pada tahun 2015 seluas tanam ±681 Ha, luas panen ±507 Ha dengan jumlah produksi ±62. Kwintal. Tahun 2014 seluas tanam ±730 Ha, luas panen ±582 Ha dengan jumlah produksi ±14.883 Kwintal. Untuk tanaman jagung dan kedelai di panen dalam kondisi panen muda.

Keadaan luas tanam, panen dan produksi Talas dan Total tanaman Palawija pada tahun 2015 dapat dilihat seperti tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.48 : Luas tanam , luas panen dan produksi ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah Kabupaten Bintan tahun 2015

No.	Kecamatan	KOMODITI								
		Ubi Kayu/Singkong			Ubi Jalar/Ketela rambat			Kacang Tanah		
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (KW)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (KW)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (KW)
1	Teluk Bintan	23	14	5.250	25	12	1.320	12	10	1.210
2	Bintan Utara	30	4	1.200	7	6	660	0	0	0
3	Teluk Sebong	12	11	4.400	7	6	660	2	2	242
4	Seri Kuala Lobam	15	12	4.320	13	9	990	8	6	726
5	Gunung Kijang	33	20	8.000	6	6	660	0	0	0
6	Bintan Timur	34	22	7.040	10	6	660	0	0	0
7	Bintan Pesisir	5	3	900	0	0	0	0	0	0
8	Mantang	2	2	600	0	0	0	0	0	0
9	Toapaya	57	28	10.080	35	18	1.980	18	13	1.573
10	Tambelan	23	17	5.100	0	0	0	0	0	0
JUMLAH Th. 2015		234	133	46.890	103	63	6.930	40	31	3.751
2014		234	194	78.350	122	93	4.000	56	40	425
2013		224	184	71.900	65	55	981	58	54,5	654
2012		145	122	73.200	63	60	759	58	58,5	52
2011		145	127	22.060	62	58	804	54,5	55,5	44,8

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan , tahun 2016

Tabel 4.49 : Luas tanam , luas panen dan produksi tales Kabupaten Bintan tahun 2015

No.	Kecamatan	Jenis Komoditi					
		Talas			Total (Ha)		
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (KW)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (KW)
1	Teluk Bintan	10	9	1.035	125	97	9669
2	Bintan Utara	0	0	0	44	17	1925
3	Teluk Sebong	0	0	0	37	33	5427
4	Seri Kuala Lobam	0	0	0	48	36	6134
5	Gunung Kijang	0	0	0	55	41	8810
6	Bintan Timur	0	0	0	79	60	8052
7	Bintan Pesisir	0	0	0	8	6	924
8	Mantang	0	0	0	2	2	600
9	Toapaya	15	7	805	260	198	15890
10	Tambelan	0	0	0	23	17	5100
JUMLAH Th. 2015		25	16	1.840	681	507	62.531
2014		39	29	187	730	582	14.883
2013		36	31	620			
2012		36	31	58			
2011		36	31	68			

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan , tahun 2016

Tabel 4.50 : Luas tanam , luas panen dan produksi tales Kabupaten Bintan tahun 2015

No	KOMODITI	LUAS PENANAMAN (Ha)	LUAS PANEN HABIS (Ha)	JUMLAH PRODUKSI (KW)
1	JAGUNG	279	264	3.120
2	KEDELAI	0	0	0
3	UBI KAYU	234	133	46.890
4	UBI JALAR	103	63	6.930
5	KACANG TANAH	40	31	3.751
6	KACANG HIAU	0	0	0
7	TALAS	25	16	1.840
Total		681	507	62.531

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan , tahun 2016

- (2) Kegiatan Pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.82.754.000,- dan realisasi sebesar Rp. 82.221.070,- atau 99,36%. Gangguan hama dan penyakit pada tanaman merupakan salah satu kendala yang cukup rumit dalam usaha pertanian. Serangan hama dan penyakit merupakan faktor yang dapat menghambat pertumbuhan dan menurunkan produksi tanaman. Serangan hama dan penyakit pada tanaman dapat datang secara mendadak dan dapat bersifat eksplosif (meluas) sehingga dalam waktu yang relatif singkat seringkali dapat menyerang seluruh tanaman dan menggagalkan panen.

Tabel 4.51 : Target keluaran (output)

Uraian	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya hand Sprayer	unit	5	100
Tersedianya Pupuk Kandang	karung	250	100
Tersedianya Pupuk NPK 16:16:16	kg	250	100
Tersedianya Nematosida Sistemik	kg	15	100
Tersedianya Insektisida kontak, lambung, pernafasan	lt	73	100
Aktraktan	lt	2	100
Fungisida	kg	14	100

Tabel 4.52 : Target hasil (outcome)

Uraian	Satuan	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya bantuan hibah hand Sprayer	unit	5	100
Terwujudnya bantuan hibah Pupuk Kandang	karung	250	100
Terwujudnya bantuan hibah Pupuk NPK 16:16:16	kg	250	100
Terwujudnya bantuan hibah nematosida sistemik	kg	15	100
Terwujudnya bantuan hibah Insektisida kontak, lambung, pernafasan	lt	73	100
Terwujudnya bantuan hibah Aktraktan	lt	2	100
Terwujudnya bantuan hibah Fungisida	kg	14	100

Tabel 4.53 : Daftar Kelompok Tani Penerima Manfaat

NO	TANGGAL PENYERAHAN	KELOMPOK	DESA/ KEL	KEC
1	31/08/2015	Karya Tani	Malang Rapat	Gunung Kijang
2	31/08/2015	Harapan Jaya	Toapaya Asri	Toapaya
3	31/08/2015	Harapan Jaya	Teluk Lobam	Seri Kuala Lobam
4	31/08/2015	Jaya Patih	Ekang Anculai	Tlk Sebung
5	31/08/2015	Ngudi Luhur	Bintan Buyu	Tlk Bintan

- (3) Pengawasan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi. dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.107.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 103.794.550 atau 96.91%. output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan monitoring dan pelaporan pupuk bersubsidi dan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi TA. 2015 Target hasil kegiatan (outcome) berupa meningkatnya pengawasan pupuk bersubsidi sehingga penyalurannya tepat sasaran dan tersusunya RDKK Pupuk Bersubsidi TA 2015. Dalam penerapan pemupukan berimbang sangat dibutuhkan modal yang cukup, sedangkan kemampuan

permodalan petani sangat terbatas dalam membiayai kebutuhan usaha taninya. Untuk itu pemerintah memfasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, agar petani dapat menerapkan teknologi pemupukan berimbang guna meningkatkan produksi dan pendapatannya. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di penyalur resmi di lini IV sebagaimana ditetapkan pemerintah. Agar pelaksanaan subsidi pupuk dapat berjalan lancar dan berhasil baik maka Pemerintah Kabupaten Bintan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2015.

Tabel 4.54 : Realisasi penebusan pupuk bersubsidi Kabupaten Bintan per-Kecamatan tahun 2015

No	Kecamatan	Realisasi Penyaluran (Kg)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORG
1	Bintan Timur	6,100	0	0	18,000	10,140
2	Bintan Pesisir	100	0	0	0	800
3	Mantang	50	0	0	1,000	3,720
4	Gunung Kijang	8,100	1,000	0	32,000	5,820
5	Toapaya	6,950	2,000	0	26,000	6,340
6	Teluk Bintan	2,300	1,000	1000	26,000	1,400
7	Teluk Sebong	9,350	2,000	0	42,000	6,000
8	Bintan Utara	6,200	4,000	0	26,000	2,990
9	Seri Kuala Lobam	50	0	0	9,000	3,920
10	Tambelan	0	0	0	0	0
JUMLAH		39,200	10,000	1,000	180,000	41,130

Tabel 4.55 : Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015

No	Kecamatan	RDKK (Kg)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORG
1	Bintan Timur	11,600	2,150	2,300	21,300	3,160
2	Bintan Pesisir	0	0	0	900	1,000
3	Mantang	200	0	0	1,000	0
4	Gunung Kijang	17,850	7,400	300	44,150	12,840
5	Toapaya	12,750	5,650	500	47,350	9,840
6	Teluk Bintan	15,700	8,000	2,500	23,650	10,000
7	Teluk Sebong	28,600	4,300	600	61,900	27,520
8	Bintan Utara	15,700	7,350	1,800	31,200	1,080
9	Seri Kuala Lobam	3,550	2,700	550	14,600	6,480
10	Tambelan	0	0	0	9,000	0
JUMLAH		105,950	37,550	8,550	255,050	71,920

Realisasi keluaran dan hasil kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan atau tercapai 100%.

- (4) Pengembangan Tanaman Jagung Manis dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.918.451,- dan realisasi sebesar Rp.19.909.051 atau 83.24%. Output dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pengembangan tanaman jagung manis dengan sasaran luas adalah sebanyak 5 Ha. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan menjadi stimulant bagi kelompok tani untuk semakin meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura, khususnya tanaman jagung manis di Kabupaten Bintan. Namun akibat adanya penghematan anggaran, maka kegiatan utama kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Pengembangan Sarana dan Prasarana Tanaman Sayuran Dataran Rendah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.227.450.000,- dan realisasi sebesar Rp.224.207.725 atau 98.57%. Output berupa tersedianya benih, pupuk, obat-obatan dan alat pertanian untuk pengembangan tanaman sayuran dataran rendah TA. 2015. Target hasil kegiatan (outcome) berupa terlaksananya perluasan areal tanaman sayuran dataran rendah TA. 2016 dengan total luasan 1 Ha yang terdiri dari penyediaan sarana dan prasarana budidaya sayuran dalam kelambu seluas

0,5 Ha dan penyediaan sarana dan prasarana budidaya sayuran luar kelambu seluas 0,5 Ha. Kebutuhan tanaman hortikultura khususnya sayuran terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi yang seimbang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sayuran bagi masyarakat adalah dengan cara meningkatkan produksi melalui usaha pengembangan sayuran yang berkesinambungan. Tingginya permintaan akan sayuran dataran rendah baik domestik maupun ekspor yang memiliki kandungan residu pestisida rendah dan aman dikonsumsi memerlukan suatu perubahan secara bertahap tentang teknik budidaya tanaman sayuran dari konvensional ke modern. Kendala yang dihadapi untuk budidaya pengembangan sayuran dataran rendah seperti tersebut di atas adalah biaya produksi yang cukup tinggi untuk sayuran dalam kelambu, terbatasnya kemampuan permodalan petani, dan terbatasnya sarana serta prasarana yang dimiliki oleh petani dan rendahnya adaptasi teknologi sehingga perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius dari Pemerintah. Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana tanaman sayuran dataran rendah mempunyai maksud memberikan dukungan sarana dan prasarana budidaya tanaman sayuran dataran rendah yang diharapkan mampu menghasilkan komoditas sayuran yang rendah akan residu pestisida secara bertahap. Adapun penerima kegiatan ini adalah:

No	Tanggal Penyerahan	K.Tani	Desa/ Kel	Kec
1	09/7/2015	Bina Karya	Toapaya	Toapaya

- (6) Penyediaan Sarana Dan Prasarana Taman Hortikultura Mini Di Pasar Tani dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan

Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.700.000,- dan realisasi sebesar Rp.52.700.000,- atau 100%.

- (7) Pengembangan Tanaman Bawang Merah Bawang merah (*allium ascalonicum*) dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.74.190.000,- dan realisasi sebesar Rp. 73.260.550 atau 98.75%. merupakan tanaman semusim yang banyak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan bawang merah semakin meningkat karena hampir semua masakan membutuhkan komoditas rempah-rempah inii. Pada periode tahun 1986-1990, Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor bawang merah, tetapi kini negara kita menjadi pengimpor komoditas ini. Jumlah impornya mencapai ribuan ton, bahkan di tahun 2013 ini harganya dapat melonjak hingga 70 ribu per kg karena kelangkaan pasokan akibat gagalnya panen petani dan permainan para importir nakal, sehingga harga bawang dipermainkan dan membuat susah rakyat kecil dan semua golongan. Guna memenuhi kebutuhan bawang merah dan menjamin ketersediaan di Kabupten Bintan dan Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pertanian dan kehutanan mengembangkan budidaya bawang merah. Diharapkan petani dapat menjadikan pengembangan bawang merah sebagai alternatif usaha tani yang prospektif karena tingginya kebutuhan terhadap bawang merah dan harga jual yang tinggi.

Tabel 4.56 : Kelompok Tani penerima manfaat Kegiatan

No	Tanggal Penyerahan	Kelompok	Desa/ Kel	Kec
1	12/4/2015	Makaryo	Toapaya Asri	Toapaya
2	12/4/2015	Harapan Jaya	Toapaya Asri	Toapaya
3	12/4/2015	Karya Tani	Malang Rapat	Gunung Kijang
4	12/4/2015	Maju Jaya	Lancang Kuning	Bintan Utara
5	12/4/2015	Pemuda Lingkar Wacopek	Gunung Lengkuas	Bintan Timur

- Realisasi keluaran dan hasil kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan atau tercapai 100%.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Sumber bibit/benih masih mendatangkan dari luar pulau Bintan
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia/ tenaga teknis dibidang Pertanian
- c. Potensi tanah di beberapa daerah masih miskin unsur hara sehingga diperlukan upaya pemupukan

2) Solusi

- d. Perlu adanya upaya peningkatan kapasitas Balai Benih Kabupaten sebagai Balai penangkar dan sumber bibit/benih di Kabupaten Bintan.
- e. Penambahan Sumber Daya Manusia dibidang Pertanian
- f. Peningkatan penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan dan upaya peningkatan kapasitas daya dukung lahan.

2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pengembangan ternak masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.427.273.709,- dan realisasi sebesar Rp.385.284.200,- atau 90.17%. dimaksudkan untuk mengembangkan ternak yang ada di masyarakat sesuai potensi lokasi dan keinginan masyarakat yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat utamanya keluarga yang pada gilirannya juga dapat menunjang perekonomian keluarga. Jenis ternak yang dikembangkan adalah ternak unggas (Ayam buras) dan Kambing. Keluaran dan hasil yang akan dicapai adalah terlaksananya pengadaan ayam buras, dan kambing dan meningkatnya jumlah ayam buras, dan kambing di Kabupaten

Bintan. Kegiatan tersebut meliputi : pengadaan ternak ayam buras sebanyak 2.000 ekor yang dibagi kepada 2 kelompok tani dengan pembagian masing-masing kelompok sebanyak 1000 ekor ; (20 KK) yang mana (1 KK 100 ekor) dengan disertai bantuan material kandang ayam serta bantuan pakan ayam. Adapun kelompok penerima yang dimaksud adalah : Kelompok Tani Mandiri; Kelompok Tani Tuah Tanjung, Desa Kuala Sempang (Kecamatan Seri Kuala Lobam). Untuk pengadaan bantuan kambing sebanyak 50 ekor dialokasikan kepada satu kelompok tani yaitu kelompok tani Wijaya (Desa Seri Bintan, Kecamatan Teluk Sebong) masing-masing petani mendapatkan 5 ekor (2 jantan; 3 betina) kambing disertai dengan bantuan material kandang.

- (2) Pengembangan Budidaya Ternak Unggas dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.362.410.000,- dan realisasi sebesar Rp.360.379.784,- atau 99.44%. Pengembangan budidaya ternak unggas dimaksudkan untuk mengembangkan ternak yang ada di masyarakat sesuai potensi lokasi dan keinginan masyarakat yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat utamanya keluarga yang pada gilirannya juga dapat menunjang perekonomian keluarga. jenis ternak yang dikembangkan adalah ternak unggas ayam buras dan itik. adapun keluaran dan hasil yang akan dicapai adalah terlaksananya pengadaan ayam buras dan itik dan meningkatnya jumlah ternak ayam buras dan itik di Kabupaten Bintan. Kegiatan tersebut meliputi : pengadaan ternak ayam buras sebanyak 2.500 ekor yang dibagi kepada 5 kelompok wanita tani dengan pembagian masing-masing kelompok sebanyak 500 ekor, Adapun kelompok penerima yang dimaksud adalah : Kelompok Wanita Tani Matahari (Mantang Baru); KWT Cenot I (Mantang Baru); KWT Melur (Desa Kelong, Kelong); KWT

Mawar (Air Gelubi, Kecamatan Bintan Pesisir) ; Kelompok Tani Kel.Tanjung Sengkuang Indah (Air Gelubi; Kecamatan Bintan Pesisir). Pengadaan ternak itik sebanyak 500 ekor yang dibagi kepada 2 Kelompok Tani dengan pembagian masing masing kelompok sebanyak 250 ekor. Adapun kelompok penerima yang dimaksud adalah; Kelompok Makmur Jaya, (Desa Numbing) dan Kelompok Bangkit Bersama, (Kel.Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara).

- (3) Budidaya Ternak Kambing dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.204.606.000,- dan realisasi sebesar Rp.193.257.700,- atau 94.45%. Pengembangan budidaya ternak kambing dimaksudkan untuk mengembangkan ternak kambing yang ada di masyarakat sesuai potensi lokasi dan keinginan masyarakat yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat utamanya keluarga yang pada gilirannya juga dapat menunjang perekonomian keluarga. jenis ternak yang dikembangkan adalah ternak kambing. adapun keluaran dan hasil yang akan dicapai adalah terlaksananya bantuan ternak kambing dan meningkatnya jumlah ternak kambing yang ada di Kabupaten Bintan. Kegiatan tersebut meliputi: pengadaan ternak kambing sebanyak 66 ekor (55 betina; 11 jantan) yang dibagi kepada 1 kelompok tani. Adapun kelompok penerima yang dimaksud adalah : Kelompok Tani Karya Bhakti (Kecamatan Toapaya).
- (4) Pengadaan Kandang Ayam Ras Pedaging (Ayam Potong) dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.010.000,- dan realisasi sebesar Rp.45.929.950,- atau 97.36%. Pengadaan kandang ayam ras pedaging dimaksud agar terlaksananya pembuatan kandang ayam ras pedaging untuk mengembangkan usaha ternak yang ada di masyarakat sesuai potensi lokasi dan

keinginan masyarakat yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat utamanya keluarga yang pada gilirannya juga dapat menunjang perekonomian keluarga. Keluaran dan hasil yang akan dicapai adalah terlaksananya pembuatan kandang ayam ras pedaging dan meningkatnya produksi hasil peternakan. Kegiatan tersebut meliputi: pengadaan kandang ayam ras pedaging dibagi kepada kelompok tani Harapan Bersama Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur.

- (5) Pengembangan budidaya ayam ras petelur dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.87.880.000,- dan realisasi sebesar Rp. 85.562.150,- atau 97.36% atau 97.36%. kegiatan ini dimaksudkan dimaksudkan untuk mengembangkan ternak yang ada di masyarakat sesuai potensi lokasi dan keinginan masyarakat yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat utamanya keluarga yang pada gilirannya juga dapat menunjang perekonomian keluarga. jenis ternak yang dikembangkan adalah ternak ayam ras petelur. adapun keluaran dan hasil yang akan dicapai adalah terlaksananya bantuan ternak ayam ras petelur dan meningkatnya jumlah ternak ayam ras petelur di Kabupaten Bintan. Kegiatan tersebut meliputi : pengadaan ternak ayam ras petelur sebanyak 300 ekor yang dibagi kepada 1 kelompok tani . Adapun kelompok penerima yang dimaksud adalah : Kelompok Tani mandiri (Kampung Hilir, Kecamatan tambelan).

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Sumber bibit masih mendatangkan dari luar pulau Bintan
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan peternakan.

- c. Masih ada sebagian petani memelihara / merawat ternaknya kurang baik (ketersediaan pakan kurang, kebersihan kandang dan tidak melaporkan kepada petugas jika ternaknya sakit)
- d. Sumber pakan bagi ternak kambing umumnya masih mengandalkan rumput lapangan.

2) Solusi

- a. Pembangunan dan pengadaan sarana dan Prasarana pendukung.
- b. Sosialisasi dan pembinaan terus menerus tentang manajemen Peternakan sehingga timbul adanya kesadaran dari peternak untuk memelihara ternaknya dengan baik.
- c. Perlu peningkatan pembinaan terhadap peternak, khususnya penyuluhan peternakan. Dalam hal ini berkoordinasi dengan Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan (BPPKP).
- d. Adanya tindakan punishment (hukuman/sanksi) dari Dinas kepada peternak yang melanggar aturan/kesepakatan bersama dan Perlu adanya komunikasi dan koordinasi antara peternak dengan Dinas agar setiap pengalihan kepemilikan ternak harus diketahui Dinas.

3) Program Peningkatkan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan alokasi anggaran Rp.43.200.000,- realisasi sebesar Rp.35.552.340,- atau 82,30% Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) merupakan segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan kesehatan

masyarakat veteriner dengan keluaran hasilnya adalah tersedianya produk pangan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Salah satu bentuk kegiatannya adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan kesehatan hewan kurban pada saat Hari Raya Idul Adha, baik pada saat hewan sebelum disembelih maupun pemeriksaan daging (setelah hewan disembelih) dan pemantauan peredaran produk asal hewan (Daging ayam dan sapi) menjelang Puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri di Pasar Tradisional. Kegiatan ini bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepri, Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bintan dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Kepri.

b. Permasalahan dan Solusi

Masih awamnya pengetahuan masyarakat tentang Kesmavet terutama berkaitan dengan peningkatan dan penyediaan bahan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Sehingga diperlukan sosialisasi tentang Kesmavet, terutama kepada masyarakat yang terkait langsung dengan proses pengolahan bahan pangan asal hewan seperti pemotong ayam, penjual daging dipasar dan panitia pelaksana pemotongan hewan kurban pada saat hari raya idul adha.

4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

a. Pelaksanaan Program

- (1) Pengamanan ternak daerah dan pengendalian zoonosis, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.346.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.302.191.940,- atau 87.34%. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah upaya menjaga kesehatan ternak di Kabupaten Bintan. Sasaran utama kegiatan ini adalah menjaga kesehatan ternak secara umum (sapi, unggas, kambing) baik

ternak Pemerintah maupun yang dimiliki oleh masyarakat dengan cara pelayanan aktif (aktif service) kesehatan hewan kepadamasyarakat, pengendalian dan surveillance penyakit zoonosis dengan keluaran hasil meningkatnya ketahanan tubuh hewan/ternak sehingga terciptanya kesehatan hewan yang berimplikasi terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat dan peningkatan pendapatan peternak di Kabupaten Bintan.

Hingga tahun 2015 Kabupaten Bintan masih dinyatakan sebagai daerah yang bebas dari beberapa penyakit zoonosis berbahaya seperti Rabies, Anthrak, Flu Babi, Brucelosis, Penyakit Mulut dan Kuku dan beberapa penyakit lainnya. Khusus Untuk Penyakit Rabies Provinsi Kepulaun Riau telah mendapat sertifikat Bebas Rabies dari Menteri Pertanian Tahun 2015. Kegiatan ini dilaksanakan di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. yakni Kecamatan Toapaya, Teluk Bintan, Teluk Sebong, Bintan Timur, Bintan Pesisir, Seri Kuala Lobam, Mantang, Bintan Utara, Gunung Kijang dan Tambelan. Namun demikian, mengingat daerah potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Bintan terfokus di Pulau Bintan saja, maka fokus pelayanan keswan dominan di pulau Bintan.

- (2) Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Puskesmas dan RPH Unggas dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.875.500,- dan realisasi sebesar Rp.9.575.500,-. atau 56.74%. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dokumen lingkungan hidup puskesmas dan RPH Unggas dan peningkatan pendapatan peternak di Kabupaten Bintan. Kegiatan ini tidak terealisasi pada tahun 2015 dikarenakan adanya penghematan anggaran

b. Permasalahan dan Solusi

Masih kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) baik tenaga teknis (*paramedic veteriner* dan sarjana peternakan) sehingga pelaksanaan tugas kurang optimal dan adanya penghematan anggaran tahun 2015 mengakibatkan Dokumen Lingkungan Hidup pada Puskesmas dan RPH Unggas belum terlaksana. Adapun tindak lanjutnya adalah mengusulkan penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) terutama tenaga teknis lapangan seperti Paramedis veteriner dan sarjana peternakan dan mengusahakan usulan penyusunan Lingkungan Hidup pada Puskesmas dan RPH Unggas pada Tahun anggaran yang akan datang.

5) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian

a. Pelaksanaan Program

- (1) Peningkatan Sarana Dan Prasarana Balai Benih Kabupaten, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.114.780.000,- dan realisasi sebesar Rp. 114.725.350,-. atau 99.95%. Keluaran dan hasil kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan sarana dan produksi tanaman hortikultura. Kegiatan pokok dari kegiatan ini adalah honorarium petugas pemelihara tanaman pada BBK (Balai Benih Kabupaten) dan belanja modal alat-alat pertanian.
- (2) Pengadaan Alat dan Mesin Tetas Telur; dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.435.980,- dan realisasi sebesar Rp.11.590.500,- atau 59.63%. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana dan pengembangan ternak unggas. Hasil dari pengadaan alat dan mesin tetas telur diharapkan dapat meningkatkan kualitas ternak ayam. Kegiatan ini tidak terealisasi pada tahun 2015 dikarenakan adanya penghematan anggaran.

b. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia/ tenaga teknis dibidang Pertanian
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan Pertanian/Perkebunan.
- c. Potensi tanah di beberapa daerah masih miskin unsur hara sehingga diperlukan upaya pemupukan
- d. Pengelolaan lahan pertanian terkendala dengan status Hutan Lindung dan Catchment area (daerah tangkapan air).

2) Solusi

- a. Penambahan Sumber Daya Manusia dibidang Pertanian, khususnya tenaga teknis Agronomi dan Hortikultura.
- b. Pembangunan dan pengadaan sarana dan Prasarana pendukung.
- c. Peningkatan penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan dan upaya peningkatan kapasitas daya dukung lahan
- d. Upaya perubahan status lahan dilaksanakan melalui usulan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Pemeliharaan Kebun Entrys Karet Dan Penanaman Sedling, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.428.490.000,- dan realisasi sebesar Rp.425.904.000,- atau 99.40%. Produksi karet khususnya produksi karet rakyat terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan banyaknya tanaman tua dan rusak serta pemilihan

bibit tanaman karet non unggulan. Pemerintah Kabupaten Bintan telah berupaya melakukan upaya revitalisasi dan peremajaan tanaman karet rakyat terhadap karet-karet tua yang tidak produktif dan optimalisasi populasi tanaman per satuan luas lahan. Upaya-upaya pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan diantaranya dengan melakukan pengadaan bibit unggul jenis PB. 260 dan membuat kebun bibit entrys karet di Km. 27 Kecamatan Toapaya pada tahun 2010. Kebun entres atau kebun kayu okulasi adalah kebun yang dibangun secara khusus sebagai sumber penghasil mata tunas yang digunakan sebagai batang atas pada teknik okulasi dalam penyiapan bibit unggul karet. Dalam usaha memproduksi bibit karet bermutu, ketersediaan kebun entres sebagai sumber mata tunas atau kayu entres mutlak diperlukan. Sebagai sumber mata okulasi, maka jenis klon yang ditanam pada kebun entres berupa klon karet anjuran yang sudah merupakan benih bina, dan dikelola sesuai dengan standar teknis. Kebun entres pada umumnya dipertahankan dalam waktu yang lama, yaitu lebih dari 8 tahun sehingga mampu menghasilkan kebun entres yang baik dan memenuhi persyaratan secara teknis. Kebun entres di Kecamatan Toapaya seluas 3,9 Ha dan telah ditanami bibit unggul jenis klon PB.260 sebanyak 1.823 batang dan IRR 39 sebanyak 5.885 batang dan sampai dengan saat ini telah menghasilkan bibit entrys sebanyak lebih kurang 34.000 batang.

Dalam upaya meningkatkan peranan kebun entrys sebagai sumber benih unggul di Kabupaten Bintan maka diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kebun bibit entrys diantaranya dengan melakukan pemeliharaan pada kebun entrys di Km. 27 Desa Toapaya Asri dan menambah berbagai sarana pengembangan diantaranya dengan membuat kebun bibit / seedling di Kota Kara Desa Bintan Buyu seluas 1 Ha. Berkenaan

dengan hal tersebut maka pada tahun 2015 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan melalui sumber dana APBD II mengalokasikan kegiatan pemeliharaan kebun entrys karet dan penanaman seedling. Tujuan pelaksanaan program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan melalui kegiatan Pemeliharaan Kebun Entrys karet dan Penanaman Seedling adalah sebagai berikut :

- ✓ Membuka lapangan wirausaha bagi masyarakat.
- ✓ Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani/ pekebun
- ✓ Membuka sentra sentra perkebunan karet.

Manfaat Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kebun Entrys Karet dan Penanaman Seedling adalah untuk menyediakan bibit karet unggul yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas kebun karet rakyat dan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Kebun Entrys telah mendistribusikan bibit karet unggul sejak tahun 2013 dan sampai dengan akhir Desember Tahun 2015 kepada petani di Kabupaten Bintan dengan jumlah bibit sebanyak 34.000 bibit dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.57 : Kelompok Tani Penerima Bibit Karet Unggul Sumber Kebun Entrys Kabupaten Bintan

No.	Lokasi	Kelompok	Jumlah (Btg)	Tahun
1	Desa Kawal Kecamatan Gunung Kijang	Makmur	4.000	2013
2	Sri Bintan Kecamatan Teluk Bintan		2.000	2013
3	Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan	Ngudi Luhur	4.000	2013
4	Desa Pengujan Kecamatan Teluk Bintan	Bintan Jaya	7.500	2013
5	Kel. Tembeling Kec. Teluk Bintan	Cahaya Purnama	7.500	2013
6	Desa Ekang Anculai Kec. Telok Seborg	Jaya Patih	3.000	2014
7	Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan	Sido Muncul	3.000	2014
8	Desa Sri Bintan Kecamatan Telok	Jati Mulyo	3.000	2015
	Jumlah		34.000	

Pada tahun 2015 kebun entrys telah berhasil melakukan okulasi bibit tanaman karet sebanyak 9.500 batang. Dari jumlah bibit okulasi tersebut telah didistribusikan kepada petani sebanyak 3.000 batang, hasil yang belum optimal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah musim kemarau yang panjang. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan Nomor : 525/SK/Distanhut/46 Tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan Bibit Karet Unggul Hasil Kebun Entry Karet Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2015 adalah Kelompok Tani Jati Mulyo Desa Sri Bintan Kecamatan Telok Sebong menerima bantuan bibit karet unggul sebanyak 3000 batang. Disamping menjalankan fungsi sebagai penghasil bibit unggul kebun entrys di Km.27 Desa Toapaya juga dijadikan sebagai tempat pelatihan bagi petani maupun petugas untuk meningkatkan kemampuan teknis okulasi karet unggul. Sampai dengan tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan pelatihan okulasi dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.58 : Kegiatan Pelatihan Petani Dan Petugas Okulasi

No.	Nama Kegiatan	Sumber Dana	Tahun	Jumlah Peserta	Peserta	Jumlah hari
1	Pelatihan okulasi karet	APBD I	2014	16 orang	Petani	14 Hari
2	Pelatihan okulasi karet	APBD II	2014	15 orang	Petugas Okulasi dan Petani Bintan buyu	5 Hari
	Jumlah			31 orang		

- (2) Pengendalian, Pengawasan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.269.878.060,- dan realisasi sebesar Rp.261.195.960,- atau 96.78%. output dari kegiatan adalah Terlaksananya pembinaan dan monitoring evaluasi (monev) petani penerima bantuan kegiatan Pengendalian,

Pengawasan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan di kelompok Tani Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Sri Kuala Lobam dan Kecamatan Teluk Bintan. Dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut maka Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan mengalokasikan bantuan hibah kepada petani berupa alat pemotong mesin rumput, pupuk dan obat obatan. Pengadaan pupuk, obat obatan dan alat Pertanian diserahkan kepada petani penerima berdasarkan surat keputusan Bupati Bintan Kepulauan Riau Nomor : 308/V/2015 Tanggal 29 Mei 2015 Tentang Penetapan Lokasi dan Petani Penerima Bantuan Pupuk, Obat obatan dan alat pertanian Kegiatan Pengendalian , Pengawasan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2015, kepada kelompok tani Kecamatan Teluk Sebong, Kelompok tani Sri Kuala Lobam dan Kelompok Tani Kecamatan Teluk Bintan. Perincian bantuan sebagai berikut :

Tabel 4.59 : Daftar Penerima Bantuan Kegiatan Tahun 2015

No.	Nama Kelomok Tani	Jenis Bantuan					Alamat
		Pupuk NPK (kg)	Herbisida Sistemik (liter)	Insektisida Sistemik (liter)	Mesin potong rumput (unit)	Hand sprayer (unit)	
1	Jati Mulyo	414	67	28	1	1	Desa Sri Bintan Kec.Teluk Sebong
2	Wijaya	-	-	-	1	1	
3	Sekuning M	-	-	-	1	1	
4	Tunas Baru	-	-	-	1	1	
5	Sukajadi	-	-	-	1	1	
6	Tunas H	-	-	-	1	1	
7	Karet Unggul	-	-	-	1	1	
8	Bangun Tani	90	15	9	1	1	Desa Ekan- anculai Kec. Teluk Sebong
9	Tegal Sari	-	-	-	1	1	
10	Jaya Pateh	-	-	-	1	1	
11	Maju Jaya	-	-	-	1	1	Desa Toapaya Kec Toapaya
12	Bina Karya	-	-	-	1	1	
13	Makmur Jaya	-	-	-	1	1-	
14	Ngudiluhur	350	58	24	1	1	Kec. Teluk Bintan
15	Sidomuncul	-	-	-	1	1	
16	Cahaya Purnama	148	25	15	1	1	
17	Kemalai Jaya	176	30	12	1	1	

18	Tunas Harapan	322	55	33	1	1	Kec. Sri Kuala Lobam
19	Pelita Jaya	-	-	-	1	1	
20	Rambung Unggul	-	-	-	1	1	Kec.Bintan Urara

Berdasarkan pada hasil pengamatan penyakit tanaman perkebunan, dapat diketahui bahwa sejumlah 2.568 batang tanaman karet rakyat telah terserang penyakit jamur akar putih dan serangan rayap. Gangguan dan serangan penyakit tersebut diantaranya disebabkan kebun karet yang kurang terpelihara sehingga banyak terdapat gulma. Banyaknya gulma pada tanaman karet juga dapat meningkatkan resiko kebakaran pada kebun karet rakyat. Dalam upaya menciptakan kebun karet yang bersih dari gulma dan meminimalkan resiko kebakaran sehingga tanaman karet dapat terpelihara dengan baik dan produktifitas tetap tinggi maka di perlukan adanya upaya- upaya untuk menjaga kebun karet rakyat tersebut agar tetap terjaga dengan baik. Upaya- upaya tersebut diantaranya dengan memberikan penyuluhan kepada petani dan bantuan alat mesin Pertanian berupa mesin potong rumput dan hand sprayer.

Namun demikian, produksi perkebunan rakyat di Kabupaten Bintan masih kurang optimal hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya :

- 1) Sebagian besar tanaman tua menggunakan bibit karet non unggulan sehingga produktifitas tanaman rendah.
- 2) Kondisi tanaman karet masih banyak yang telah tua dan rusak (TTR)
- 3) Masih rendahnya sebagian kualitas SDM petani dalam penyiapan dan pengolahan hasil karet.
- 4) Kurangnya modal petani untuk perluasan, peremajaan dan pemeliharaan tanaman perkebunan.

Tujuan diadakan Kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Program Peningkatan

Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan melalui kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagai berikut Membuka pola pikir Masyarakat terhadap pengelolaan kebun karet yang benar, Meningkatkan Produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan, Menjamin berkelanjutan produksi tanaman perkebunan sebagai sumber bahan baku industri, Meningkatkan pendapatan petani melalui sektor perkebunan karet unggul dan Mengendalikan Penyakit rayap dan jamur akar putih pada tanaman karet.

- (3) Pendamping Pengembangan Tanaman Perkebunan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.181.015.320,- dan realisasi sebesar Rp.173.868.900,- atau 96.05%. Melalui dana APBN pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Bintan mendapat alokasi kegiatan Peremajaan Karet seluas 100 Ha. Dalam upaya mendukung kegiatan tersebut maka Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan mengalokasikan kegiatan pendampingan pengembangan tanaman perkebunan. Sasara kegiatan tersebut adalah dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.60 : Daftar Nama Kelompok Tani Penerima Bantuan Peremajaan Karet Sumber Dana APBN Tahun 2015

No.	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota (Orang)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Bibit Diterima (Btg)
1	Unggul Jaya	Desa Bintan Buyu Kec. T. Bintan	9	14	7.000
2	Maju Jaya	Kelurahan Tembeling Tanjung Kec. T. Bintan	13	23	11.500
3	Sri Rezeki	Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong	15	16,5	8.250
4	Unggul Jaya	Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong	19	22	11.000
5	Cemara	Desa Kuala Sempang Kecamatan Sri Kuala Lobam	18	24,5	12.250
JUMLAH TOTAL			74	100	50.000

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan

Dalam upaya memaksimalkan tujuan bantuan dari kegiatan tersebut maka melalui dana APBD Kabupaten Bintan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan mengalokasikan pengadaan belanja pengadaan belanja modal 4 (empat) unit Chainsaw, pemanfaatan chain saw tersebut dilakukan dengan cara pinjam pakai kepada kelompok tani sehingga hal ini diharapkan dapat mempermudah kerja petani dalam melakukan pembersihan lahan. Disamping itu juga dialokasikan belanja jasa konstruksi berupa pemberian insentif jasa pembukaan lahan dan pengolahan tanah kepada kelompok tani sebesar Rp.500.000,- / Ha dengan nilai total Rp.50.000.000,-. Insentif ini diberikan guna memberi rangsangan kepada petani agar dapat melakukan penanaman dan perawatan sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh petugas.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Sebagian besar tanaman tua menggunakan bibit karet non unggulan. Peremajaan / pengembangan secara swadaya menggunakan bibit sapuan sehingga tingkat produksi rendah.
- b. Kondisi tanaman karet masih banyak yang telah tua dan rusak (TTR). Sebagian tanaman karet petani adalah tanaman tua rusak (TTR) sehingga walaupun luasan yang dimiliki cukup namun produktifitas pohon karet rendah.
- c. Masih rendahnya sebagian kualitas SDM petani dalam penyiapan dan pengolahan hasil karet
- d. Kurangnya modal petani untuk perawatan, pemupukan dan pemeliharaan tanaman perkebunan.
- e. Lemahnya perawatan mengakibatkan biji karet yang tumbuh liar menjadikan kebun karet merubah menjadi hutan karet, hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas pohon karet.

- f. Rendahnya pemanfaatan teknologi sederhana pada tingkat petani.
- g. Maraknya alih fungsi kebun karet menjadi areal penggunaan lainnya .
- h. Rendahnya harga jual karet sehingga menyebabkan usaha ini kurang menarik hal ini mengakibatkan motivasi petani untuk merawat dan menjalankan usaha perkebunan karet rakyat rendah.

2) Solusi

- a. Peningkatan modal dan kualitas sumber daya manusia petani sebagai upaya peningkatan produksi perkebunan.
- b. Meningkatkan harga jual karet melalui peningkatan kualitas produksi dan kemitraan dengan perusahaan perkebunan.

4.2.4. Urusan Kehutanan

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Ketiga** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Sosial adalah sebagai berikut : Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat **63,62%**; Kerusakan Kawasan Huta **26,26%**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Konservasi, Keanekaragaman Hayati Dan Perlindungan Hutan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Rehabilitasi dan Reboisasi Hutan dan Lahan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Keluaran dan hasil yang diperoleh adalah tersedianya bibit tanaman hutan dan mangrove. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran.

- (2) Pengamanan dan Perlindungan Hutan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.128.178.975,- dan realisasi sebesar Rp.127.069.950,- atau 99.13%. output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pengamanan dan Perlindungan Hutan dilaksanakan pada 6 (enam) Hutan Lindung yang ada di Kabupaten Bintan yaitu Hutan Lindung Sei Pulai, Hutan Lindung Gunung Lengkuas, Hutan Lindung Gunung Kijang, Hutan Lindung Sei Jago, Hutan Lindung Gunung Bintan Besar, dan Hutan Lindung Gunung Bintan Kecil. Kegiatan yang dilakukan dalam pengamanan dan perlindungan hutan adalah patroli pengamanan hutan oleh Polisi Kehutanan dan Satuan Pengamanan Hutan (SATPAMHUT), pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan akan pentingnya hutan dan koordinasi dengan pihak kecamatan. Dari hasil kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan tahun 2015 ditemukan adanya kasus perambahan hutan. Terhadap pelaku telah diberikan pembinaan dan teguran secara tertulis dan memasang spanduk-spanduk di sekitar kawasan hutan lindung larangan untuk menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan dan atau merambah secara tidak sah.
- (3) Rehabilitasi Lahan Kritis Daerah Aliran Sungai (DAS) Bintan (DAK), dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan alokasi anggaran Rp.1.349.652.150,- dan realisasi sebesar Rp. 931.736.250,- atau 69.04%. output kegiatan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 50 Ha di Hutan Lindung Sei Jago Kelurahan Tanjung Uban Utara Kecamatan Bintan Utara. Adapun jenis tanaman yang ditanam antara lain mahoni, pulai, dan jengkol sebanyak 55.000 batang. Bantuan lainnya berupa pembuatan sumur resapan sebanyak 20 unit di Desa Sebong Pereh (Kecamatan Teluk Sebong) dan Kelurahan Tanjung Uban Utara (Kecamatan Bintan Utara). Kegiatan RHL

dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani Kp Harapan dan Kp Sakera Dua. Disamping itu juga dilaksanakan pengadaan bibit penghijauan lingkungan berupa Mahoni, Mangga, Rambutan, Pulai sebanyak 4.335 batang. Bibit tersebut diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hasilnya adalah meningkatkan luasan kawasan hutan hijau, daya tampung air di DAS Bintan.

- (4) Pendukung Kegiatan DAK Rehabilitasi dan Reboisasi Hutan dan Lahan Kritis DAS Bintan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan alokasi anggaran Rp.94.132.850,- dan realisasi sebesar Rp. 85.381.100,- atau 90,70%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Lahan Kritis Daerah Aliran Sungai (DAS) Bintan (DAK) tersedia dana pendukung kegiatan DAK dengan kegiatan antara lain menyusun rancangan teknis (rantek) RHL di Hutan Lindung Sungai Jago, sosialisasi kepada masyarakat peserta kegiatan RHL dan Monitoring dan Evaluasi.
- (5) Pembangunan Hutan Hak / Rakyat, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.185.500.000,- dan realisasi sebesar Rp183.755.000,- atau 99,06%. output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian bantuan hibah kepada Kelompok Tani Sari Makmur Kp Lome RT 06 RW 03 Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Kelompok tani diketuai oleh Suriono dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang. Bantuan tersebut berupa tanaman sengon sebanyak 20.000 batang, pupuk kompos sebanyak 4.000 Kg, dan pupuk NPK sebanyak 2.000 Kg, bantuan biaya pembuatan lubang tanam. Hasilnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan

b. Permasalahan dan Solusi

Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga Hutan Lindung (lindung darat maupun mangrove), sehingga banyak dijumpai adanya perambahan Hutan Lindung dan

Penimbunan Mangrove. Sehingga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar Hutan Lindung akan pentingnya peran hutan lindung bagi kehidupan sehingga harus dijaga kelestariannya.

2) Program Inventarisasi dan Pemetaan Sumber Daya Hutan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Inventarisasi dan Pemetaan Hak-Hak Pihak Ketiga dalam Kawasan Hutan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.245.180.000,- dan realisasi sebesar Rp.243.675.400,- atau 99.39%. Keluaran atau hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terlaksananya inventarisasi dan pemetaan lahan-lahan masyarakat dalam kawasan hutan bahwa hak kepemilikan kawasan hutan Kabupaten Bintan seluas 31.141,45 Ha atau 80,26%. Inventarisasi Pemetaan Hak-Hak Pihak Ketiga dalam Kawasan Hutan Tahun 2015 dilaksanakan di 10 Kecamatan dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.61 : Inventarisasi Pemetaan Hak-Hak Pihak Ketiga dalam Kawasan Hutan Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas Kawasan Hutan (Ha)	Inventarisasi Hak-Hak Pihak Ketiga (Ha)
1	Bintan Pesisir	3.175,10	1.613,69
2	Bintan Timur	2.209,87	1.734,06
3	Bintan Utara	2.513,33	1.713,35
4	Gunung Kijang	7.976,96	7.659,14
5	Mantang	2.151,41	801,25
6	Seri Kuala Lobam	5.747,66	4.933,31
7	Tambelan	948,47	833,80
8	Teluk Bintan	4.142,80	2.641,23
9	Toapaya	1.941,08	1.865,50
10	Teluk Sebong	7.989,55	7.346,12
Total		38.796,23	31.141,45

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan

- (2) Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Mangrove di Kabupaten Bintan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.112.800.000,- dan realisasi sebesar Rp.112.243.450,- atau 99.51%. Output atau hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terlaksananya inventarisasi dan pemetaan

hutan mangrove di Kabupaten Bintan yaitu seluas 7.654,78 Ha dan yang bukan merupakan kawasan hutan APL seluas 2.904,24 Ha, air seluas 27,36 Ha. Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Mangrove di Kabupaten Bintan dilakukan melalui hasil penafsiran Citra Satelit (LANDSAT) yang kemudian diikuti dengan Ground Check ke lapangan. Adapun Mangrove di Kabupaten sesuai hasil inventarisasi dan pemetaan adalah:

Tabel 4.62 : Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Mangrove di Kabupaten Bintan

No	Kecamatan	Luas Kawasan Hutan (Ha)
1	Bintan Pesisir	1.561,41
2	Bintan Timur	457,81
3	Bintan Utara	799,98
4	Gunung Kijang	317,82
5	Mantang	1.350,16
6	Seri Kuala Lobam	814,35
7	Tambelan	114,67
8	Teluk Bintan	1.501,57
9	Teluk Sebong	643,43
10	Toapaya	75,58
Total		7.654,78

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan

b. Pelaksanaan Program

1) Permasalahan

- Pengetahuan masyarakat terhadap peranan dan manfaat Hutan Mangrove masih minim dan terbatas.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Batas-batas hutan dan kawasan lainnya
- Pal batas hutan (khususnya hutan lindung) umumnya banyak yang sudah rusak.

2) Solusi

- Sosialisasi peranan dan manfaat Hutan Mangrove perlu ditingkatkan.
- Pelaksanaan sosialisasi tata batas hutan lindung perlu ditingkatkan.

- c. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar Hutan Lindung akan pentingnya hutan bagi kehidupan sehingga harus dijaga kelestariannya.
- d. Perlu usulan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII Tanjungpinang untuk memasang kembali PAL batas Hutan Lindung yang sudah hilang karna merupakan wewenang dan tugas BPKH.

3) Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)

a. Pelaksanaan Program

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha / Kelompok Perorangan yang berada di DAS dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.129.150.000,- dan realisasi sebesar Rp. 128.370.000,- atau 99.40%. Output atau hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemantauan usaha kehutanan dan tertib peredaran hasil hutan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain Pembinaan kepada masyarakat di dan sekitar hutan, pembinaan/ bimbingan usaha-usaha kehutanan, pemasangan plang himbauan di hutan lindung, pemasangan plang himbauan di hutan mangrove, serta pembuatan banner peredaran hasil hutan. Kelompok sasaran kegiatan ini adalah masyarakat di dan sekitar kawasan hutan dan usaha-usaha bidang kehutanan di Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Bintan Timur.
- (2) Sosialisasi Pelestarian Mangrove dan Pemanfaatan Mangrove, Keluaran atau hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pelestarian mangrove dan pemanfaatan mangrove.

b. Permasalahan dan Solusi

Pengetahuan masyarakat terhadap peranan dan manfaat Daerah Aliran Sungai masih minim dan terbatas dan solusinya adalah Sosialisasi peranan dan manfaat Daerah Aliran Sungai perlu ditingkatkan.

4.2.5. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Ketujuh** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Sosial adalah sebagai berikut : Pertambangan tanpa ijin **14%**. Rasio ketersediaan daya listrik **96,78%**; Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik **77,33%**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pembinaan Usaha Pertambangan Umum dan Sumberdaya Mineral

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Evaluasi Kegiatan Reklamasi, Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.105.444.780,-, realisasi anggaran sebesar Rp.100.337.300,- atau 95,16%. Output dari Kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi kegiatan pertambangan di 14 Perusahaan yang tersebar di enam Kecamatan yakni Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang, Mantang, Seri Kuala Lobam, Teluk Sebong, Teluk Bintan dan Bintan Pesisir. Hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya kepedulian kegiatan pertambangan terhadap lingkungan sekitarnya untuk mewujudkan good mining practice. Terkait dengan kegiatan ini telah dilaksanakan reklamasi lahan pasca tambang sejak tahun 2011 dengan luas lahan 734 ha hingga pada tahun 2014 telah bertambah luasnya lahan 7.234 ha, sedangkan pada tahun 2015 reklamasi tidak dapat dilaksanakan terkait dengan adanya Undang-undang No.23 Tahun 2014 oleh

pemerintah pusat maka bupati / walikota tidak memiliki kewenangan lagi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan mineral dan batubara, segala kegiatan yang berhubungan dengan reklamasi telah dilimpahkan ke pihak provinsi dan pusat.

- (2) Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Pertambangan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.864.400,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. – atau 0 %. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan dan evaluasi kegiatan pertambangan umum. Hasil dari kegiatan ini terkendalinya usaha pertambangan dengan tertib sesuai dengan peraturan di enam kecamatan yakni Bintan Timur, Gunung Kijang, Mantang, Seri Kuala Lobam, Teluk Sebong, Teluk Bintan dan Bintan Pesisir. Terkait kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena telah terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah Tanggal 2 Oktober 2014 yang menyatakan kewenangan dari Kabupaten / Kota dialihkan ke pemerintahan pusat dan Provinsi.
- (3) Evaluasi Kegiatan Dana Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (DPPM), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.482.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.100.326.500,- atau 99,85 %. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Evaluasi Kegiatan Dana Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (DPPM). Hasil dari kegiatan ini adalah Terwujudnya Pelaksanaan Dana Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (DPPM), di 14 Perusahaan yakni PT.Gunung Sion, PT.Danpac Resources, PT. Gunung Bintan Abadi, PT. Bintang Cahaya Terang, PT.Wahana Karya Suksesindo Utama, Pt. Bina Dompok Indah, PT. Lobindo Nusa Persada, PT. Tunggul Ulung Makmur, PT. Gunung Kijang Jaya Lestari, PT. Tri Panorama Setia, PT. Buana Bangun Sejati, PT. Mitra Investindo, PT. Bintan Nusa Multi. Terkait kegiatan ini telah dilaksanakan program Evaluasi dan

Pemantauan Kegiatan DPPM yang diharapkan dapat membantu pihak perusahaan dalam menyusun program pemberdayaan masyarakat agar tepat sasaran dan sejalan dengan program pemerintah sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Pada tahun 2015 Dana Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan, merupakan program unggulan sebagaimana Visi dan Misi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bintan guna terciptanya manusia yang siap bersaing dalam sektor-sektor pembangunan dan perekonomian Kabupaten Bintan di masa yang akan datang. Program DPPM diarahkan kepada bidang pendidikan yakni bantuan beasiswa terhadap siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang Diploma / Perguruan Tinggi melalui dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan. Untuk **bantuan beasiswa** melalui tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan tahun 2015 jumlahnya telah mencapai **Rp.4.290.934.600,-** yang merupakan program DPPM dari perusahaan. Pembagian DPPM dapat dibagi menjadi dua wilayah untuk masyarakat yang terkena dampak yaitu:

- 1) Ring I adalah masyarakat yang ada di wilayah blok penambangan (1 – 2 km) dan mendapat 70% dari keseluruhan DPPM yang tersedia;
- 2) Ring II adalah masyarakat yang ada di sekitar wilayah penambangan yang terkena dampak tidak langsung (> 2 km) dan mendapat sekitar 30% dari keseluruhan DPPM yang tersedia.

Pencairan DPPM dapat diajukan oleh pihak Perusahaan dan masyarakat melalui Lurah atau Kades/BPD di Kelurahan atau desa setempat dikoordinir oleh Camat kepada perusahaan

pertambangan dan dapat dicairkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan. Perusahaan yang telah melaksanakan program DPPM pada tahun 2015.

- (4) Pembinaan dan Pengawasan K3 serta Lingkungan Pertambangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.417.600,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0%. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja lingkungan hidup di perusahaan tambang pemegang IUP di Kabupaten Bintan. Hasil Kegiatan ini adalah tidak dapat dijalankan dikarenakan telah diterbitkannya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tanggal 2 Oktober 2014 yang menyatakan kewenangan dari Kabupaten / Kota dialihkan ke Pemerintahan Pusat dan Provinsi, serta tidak memiliki kewenangan lagi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya dibidang pertambangan mineral dan batubara dan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertambangan Provinsi selaku Kepala Inspektor Tambang Provinsi yang berkoordinasi dengan pusat.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Pelaku tambang pasir tidak mengindahkan Surat Edaran Bupati No.540/Distamben-02/429, hal ini tentang penghentian Sementara Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), disampaikan kepada pelaku tambang tanpa izin melalui Camat setempat.
- b. Penambang tidak memperhatikan aturan yang ada melakukan penambangan tanpa memegang izin dari pihak terkait;
- c. Lokasi yang ditambang tidak memperhatikan letak tataruang;

- d. Pengerukan atau dengan menggunakan mesin pengusap pasir tidak memperhatikan posisi inprastruktur yang terdekat dengan badan/marka jalan (Jalan Umum) yang Bisa menyebabkan jalan rusak;
- e. Bekas tambang yang ditinggalkan menjadi rusak atau menjadi kolam-kolam yang tidak bisa di reklamasi;
- f. Penambang yang masih membandel, karena sudah berulang kali diperingatkan untuk menghentikan penambangan pasir, namun kegiatan penambangan tetap juga di teruskan;
- g. Dalam menangani pelaku-pelaku tambang tanpa izin, bidang pengawasan Distamben dan Satpol PP masih belum bisa melakukan penindakan secara maksimal, karena Satpol PP belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2) Solusi

- a. Melakukan pendataan pada beberapa lokasi-lokasi yang dilakukan penambangan dari Distamben mengharapakan kedepan adanya kebijakan agar penambangan tersebut diberikan Izin tambang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pelaku tambang kebanyakan masyarakat karena akibat dari terbatasnya lapangan pekerjaan sektor industri, perdagangan dan jasa sehingga masyarakat mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2) Program Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Minyak dan Gas

a. Pelaksanaan Program

Pendataan Monitoring dan Evaluasi Distribusi Minyak dan Gas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.62.925.400,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.46.853.300,- atau 74,46%. Output dari kegiatan ini adalah Evaluasi Distribusi Minyak dan Gas. Hasil kegiatan ini adalah Terkendalinya Pendistribusian Minyak dan Gas di Kabupaten Bintan, kegiatan ini

dimaksudkan untuk pembinaan terhadap para pelaku di bidang Minyak dan Gas Bumi termasuk masalah jalur Distribusinya sehingga dapat langsung dinikmati oleh masyarakat dan tetap terjaganya kestabilan naik harga maupun ketersediaannya bahan bakar minyak ditengah-tengah masyarakat.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Keberadaan Kios yang tidak diatur dalam perundang-undangan berpotensi menambah tingkat “kehilangan” sejumlah BBM bersubsidi, karna penyebarannya serta konsumennya cukup banyak dan tidak terdata.
- b. Belum adanya sistem rayonisasi penyaluran BBM subsidi oleh 1 Agen penyalur minyak solar (APMS) ke Kios-kios;
- c. Jadwal pengambilan BBM subsidi di APMS oleh konsumen tidak diatur dengan baik;
- d. Data tentang jumlah Konsumen berdasarkan kelompok dan jumlah pemakaian BBM tidak akurat;

2) Solusi

- a. Untuk pengaturan / pengurangan jumlah kios melalui peraturan Bupati dengan pengaturan persyaratan teknis lingkungan pada bangunan penyimpanan BBM;
- b. Perlunya penetapan rayonisasi untuk pendistribusian BBM subsidi ke kios-kios oleh APMS;
- c. Perlunya pengaturan jadwal pengambilan BBM subsidi oleh konsumen pada APMS yang di buat oleh APMS berdasarkan kelompoknya;
- d. Pendataan jumlah konsumen BBM subsidi sesuai yang diatur dalam peraturan BPH Migas No. 5/2012;
- e. Pemanfaatan kuota BBM pada AMSTN di Kab. Bintan

- f. Melakukan pengawasan bersama dengan instansi terkait dan aparat keamanan.

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Migas Bidang Ketenagalistrikan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Pengembangan Listrik Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.611.000.000,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp.599.329.000,- atau 98,45 %. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Jaringan Tegangan Menengah. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik Perdesaan di Kabupaten Bintan, terkait kegiatan ini untuk membantu daerah-daerah yang belum teraliri listrik PLN dikarenakan keterbatasan daya, maka Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Program Pengembangan Listrik Perdesaan telah merealisasikan pembangunan listrik desa di beberapa lokasi yang belum terjangkau oleh Listrik PLN. Sepanjang Tahun 2015, dimana persentase rumah tangga pengguna listrik (Termasuk Sosial, Bisnis, Publik) sampai dengan 2015 semakin bertambah hal ini dilihat dari Kegiatan berikut :

Paket Pekerjaan Pengembangan Listrik Pedesaan :

- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Telang Besar Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang (1 Paket) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.84.451.000,- atau 99,46 %;
- Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik di Kp.Lakis Desa Mantang Baru Kecamatan Mantang (1 Paket) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.149.325.000,- atau 99,55%;
- Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik di Kp. Mantang Riau dan di Kp. Mantang Lama Desa Mantang

Lama Kecamatan Mantang (1 Paket) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.89.390.000,- atau 99,32%;

- Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik di Jl. Pinang Indah RT. 04/Rw.02 Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang (300 m; 1 Keg) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.59.489.000,- atau 99,15%;

(2) Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelistrikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.019.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.003.661.300,- atau 98,45%. Hasil Kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan listrik (jaringan) bagi aparatur dan masyarakat melalui pelaksanaan paket pekerjaan : Paket pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Kelistrikan

- Pemasangan Instalasi Listrik dan Penyambungan Daya Listrik di SDN 001, SDN 002, SDN 003, SMPN 23, SMA Negeri di Kec. Mantang (1 Keg) alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.149.520.000,- atau 99,68%;
- Pemasangan Tiang Listrik dan Jaringan PLN di Bangun Rejo RT.003 / RW.002 Gg.Gabus Kel. Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.198.980.000,- atau 99,49% ;
- Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Tenaga listrik di Kec. Toapaya alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.293.180.000,- atau 97,73 % ;
- Pengadaan dan Pemasangan Panel Genset utk Gedung Expo Kabupaten Bintan alokasi anggaran sebesar Rp.58.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.57.873.000,- atau 99,78 % ;

- Penataan Jaringan Listrik di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Bintan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.199.081.000,- atau 99,54% ;
 - Pemasangan Jaringan Listrik dan Penyambungan Daya Listrik di SDN.12 Teluk Bintan di Desa Siantan Kec. Teluk Bintan alokasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.19.228.000,- atau 96.14% ;
- (3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelistrikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.237.792.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.1.196.217.000,- atau 96,64 %. Hasil Kegiatan ini adalah memenuhi sarana dan prasarana kelistrikan yang memenuhi standart ketenagalistrikan melalui pelaksanaan paket pekerjaan :
- Pemeliharaan Jaringan Listrik di Kabupaten Bintan (3 Paket) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.146.894.000,- atau 97,93 %;
 - Pengadaan Bahan Jaringan Instalasi Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 98.887.000,- atau 98,89% ;

Tabel 4.63.1 : Indikator Pencapaian Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Tahun 2011 - 2015

No.	Indikator Pencapaian	Tahun	Target	Capaian	Ket
1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	2011	61,00	59,35	%
2.		2012	62,00	68,95	%
3.		2013	63,00	75,49	%
4.		2014	63,00	71,00	%
5.		2015	65,00	77,33	%

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan Tahun 2016

Tabel 4.63.2 : Indikator Pencapaian Rumah Tangga Pengguna Listrik (Termasuk Sosial, Bisnis, Publik) Tahun 2011 - 2015

No.	Indikator Pencapaian	Tahun	Target	Capaian	Ket
1.	Rumah tangga pengguna listrik (termasuk Sosial,Bisnis,Publik)	2011	15.918	19.341	%
2.		2012	16.118	27.269	%
3.		2013	16.318	28.662	%
4.		2014	16.318	28.320	%
5.		2015	16.718	31.447	%

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan Tahun 2016

Bahwa untuk Rumah Tangga Pengguna Listrik (Termasuk Sosial, Bisnis, Publik) dari Tahun 2011 s/d 2015 kebutuhan listrik semakin bertambah dikarenakan penduduk yang ada di Kabupaten Bintan semakin meningkat baik itu rumah tangga, sosial, bisnis maupun Publik.

Tabel 4.64 : Rasio Elektrifikasi Listrik Desa Tahun 2011 - 2015

No.	Indikator Pencapaian	Tahun	Target	Capaian	Ket
1.	Rasio Elektrifikasi Listrik Desa	2011	77	99,98	%
2.		2012	78	98,98	%
3.		2013	79	75,49	%
4.		2014	80	75,54	%
5.		2015	81	81,47	%

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan Tahun 2016

Di Kabupaten Bintan **rasio elektrifikasi pada tahun 2015 sudah mencapai 81,47 %** yang artinya mengalami kenaikan 5,93 % dari 75,54 % pada tahun 2014, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.65 : Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Bintan Tahun 2015

No.	Sumber Daya	Pelanggan	Rasio Elektrifikasi
1.	Listrik Perdesaan	1.505	3,70 %
2.	PLN	31.447	77,33 %
3.	PLTS / SHS	179	0,44 %
4.	Rumah Tangga Belum Berlistrik	6.263	15,40 %

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan Tahun 2016

Tabel 4.66 : Neraca Listrik Kabupaten Bintan Tahun 2015

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Produksi	646.038.867
2.	Daya Terpasang (KW)	189.217
3.	Daya Mampu (KW)	132.157
4.	Beban Puncak (KW)	132.310
5.	Surplus/Defisit (KW)	(153)

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan Tahun 2016

1. Interkoneksi Batam - Bintan

PT PLN (Persero) membangun empat gardu induk untuk mendukung pelaksanaan interkoneksi listrik dari Batam ke Bintan. Keempat gardu induk ini dibangun di Tanjungsauh, Tanjung Uban, Ehang Anculai dan Kijang.

Setiap gardu induk berfungsi menurunkan daya dari 150 kilo Volt (kV) ke 20 kV. Begitu juga untuk kabel bawah laut dikerjakan oleh konsorsium. Diharapkan proyek ini sudah selesai pada bulan Juni tahun 2014 mendatang, sehingga tahun depan krisis energi di Bintan dan Tanjungpinang dapat teratasi.

Potensi daya dari PLTU Tanjungkasam terang Agustian, 110 Mega Watt (MW), sedangkan kebutuhan listrik Bintan Tanjungpinang 55 MW. Kebutuhan daya listrik untuk wilayah Tanjungpinang dan Kijang 49 MW pada beban puncak. Sedangkan untuk Tanjunguban 5,7 MW pada beban puncaknya.

Sebelumnya PT PLN Batam bersama PT PLN Persero berencana menghubungkan sistem kelistrikan Batam-Bintan melalui jaringan interkoneksi kabel listrik bawah laut 150 kV dengan pemasangan kabel listrik sepanjang 11 kilometer. Proyek tersebut terdiri dari koridor barat berupa pemasangan kabel listrik bawah tanah 150 kV dengan panjang seribu meter. Selain itu untuk melancarkan suplai listrik ke Bintan, PLN Batam juga akan memasang kabel listrik bawah laut sepanjang 3.450 meter dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tanjungkasam, Batam ke Ngenang melewati Tanjungsauh.

Selain itu juga akan ada pemasangan kabel listrik di koridor timur dengan memasang kabel listrik bawah laut 150 kV sepanjang 6.550 meter dari Ngenang ke Tanjung Taluk, Bintan. Proyek itu akan berjalan selama 14 bulan sejak ditandatanganinya kontrak dan diharapkan selesai pada pertengahan 2014.

Penandatanganan kontrak proyek pembangunan kabel listrik bawah laut tersebut ditandatangani Direktur utama PLN, Nur Pamudji bersama leader konsorsium Yoshiro Matsui sebagai chief staff Viscas Corporation dan Permadi Setiakusuma sebagai President Director PT Karya Mitra Nugraha, bulan lalu. Kepala PLN Ranting Tanjunguban Iwan membenarkan, satu buah gardu induk sedang dibangun oleh konsorsium di Tanjunguban, disamping power house PLN Ranting Tanjunguban. Saat ini, konsorsium sedang membangun gardu induk di Tanjunguban.

2. PLTU Galang Batang

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan selalu berdaya upaya untuk mengatasi krisis listrik di Kabupaten Bintan sendiri. Salah satu diantaranya adalah memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi perusahaan-perusahaan yang berkompeten untuk membangun di Kabupaten Bintan khususnya di bidang kelistrikan. PT. Capital Turbines Indonesia bergerak dalam kegiatan PLTU removeable, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Bintan melalui sistem jaringan PLN di Tanjungpinang. PT. Capital Turbines Indonesia telah membangun PLTU removeable di Desa Galang Batang Kecamatan Gunung Kijang dengan kapasitas turbin 2 x 15 MW. Pada bulan Desember 2011 kemarin telah dilakukan uji coba sinkronisasi penggabungan tenaga listrik PLTU Galang Batang yang dikerjakan PT Capital Turbine Indonesia (CTI) dengan PLN ini. Dari dua mesin rencana pembangkit yang akan menghasilkan tenaga listrik dua kali 15 Mega Watt, saat ini baru dirampungkan satu pembangunan listrik dengan tenaga Uap berbahan bakar Baru bara, dengan kekuatan tenaga listrik yang dihasilkan pertama mencapai 12 Mega Watt.

3) Program Pengembangan Listrik Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

a. Gambaran Umum Kelistrikan Kabupaten Bintan

Secara nasional, rasio elektrifikasi di tanah air pada per September tahun 2015 sebesar **80,1 %**, jadi tinggal 20% masyarakat Indonesia yang belum menikmati listrik. Untuk rumah tangga kira-kira 12,5 juta rumah tangga yang belum berlistrik yang tersebar merata diseluruh Indonesia.

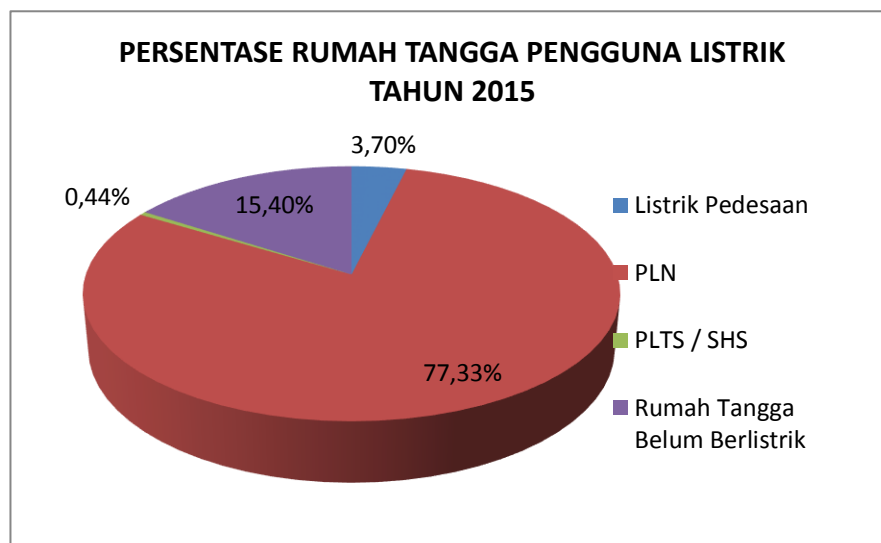
Di Kabupaten Bintan sendiri rasio elektrifikasi pada tahun 2013 baru mencapai 75,49%, yang artinya hanya mengalami kenaikan sebesar 1,16% dari 74,33% pada tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.67 : Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

NO	SUMBER DAYA	PELANGGAN	RE (%)
1.	Listrik Pedesaan	1.505	3,70%
2.	PLN	31.447	77,33%
3.	PLTS / SHS	179	0,44%
4.	Rumah Tangga Belum Berlistrik	6.263	15,40%
JUMLAH RUMAH TANGGA		40.668	

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan Tahun 2016

Grafik 4.77 : Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2015



Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan Tahun 2016

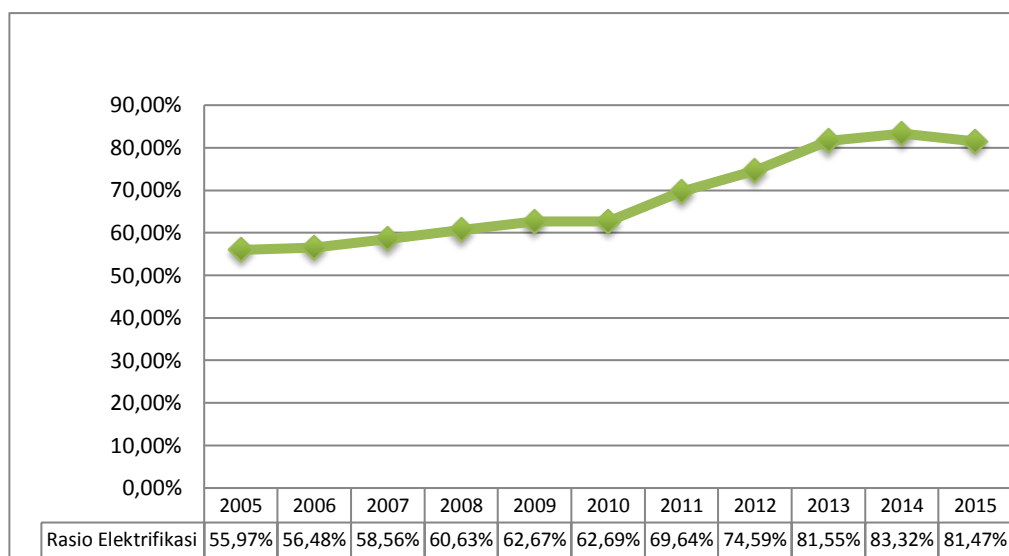
Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat masih ada desa-desa di Kabupaten Bintan yang belum mendapat listrik yaitu sebesar 15,40% atau ± 6.263 rumah tangga belum berlistrik.

b. Program Pengembangan Listrik Pedesaan

Untuk membantu daerah-daerah yang belum teraliri listrik PLN dikarenakan keterbatasan daya, maka Pemerintah Kabupaten Bintan melalui program pengembangan listrik pedesaan telah merealisasikan pembangunan listrik desa di beberapa lokasi yang belum terjangkau oleh listrik PLN. Sepanjang tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Bintan telah merealisasikan sebanyak 76 lokasi yang tersebar di Kabupaten Bintan dan pulau-pulau terpencil.

Rata-rata kenaikan Rasio listrik desa dari tahun 2006 sampai tahun 2011 di Kabupaten Bintan mencapai 14,47 %. Pada tahun 2006, rasio listrik desa hanya mencapai 27.63 %. Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya untuk meningkatkan rasio listrik desa tersebut. Hingga pada tahun 2011, rasio listrik desa berdasarkan target yang direncanakan telah mencapai 99.98 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 4.78 : Rasio Elektrifikasi Kabupaten Bintan Tahun 2005 - 2015



Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan Tahun 2016

4.2.6. Urusan Industri

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kedua** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Sosial adalah sebagai berikut : Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 37.18%.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Promosi Pemasaran (Partisipasi Pameran) Produk Kerajinan dan Produk IKM Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan

- alokasi anggaran sebesar Rp.391.083.000,- dan terealisasi sebesar Rp.389.704.190,- (99,65%). Hasil kegiatan ini adalah para IKM turut serta dalam kegiatan pameran yang dilaksanakan di Bali, Batam, Jakarta dan Negara Malaysia dan promosi produk-produk unggulan IKM Kabupaten Bintan pada ajang pameran tersebut;
- (2) Kegiatan Dukungan Operasional dan Partisipasi pada Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.234.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp.159.646.500,- (67,96%). Hasil kegiatan ini adalah tersedianya dukungan untuk operasional Dekranasda Kabupaten Bintan dan terlaksananya promosi hasil kerajinan yang dilaksanakan oleh Dekranasda Kabupaten Bintan melalui pelaksanaan pameran baik tingkat Kabupaten, Propinsi Maupun Nasional;
 - (3) Kegiatan Pelatihan Enterpreneuship untuk Tamatan SLTA dan Sarjana yang masih belum bekerja di Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.142.954.000,- dan terealisasi sebesar Rp.138.822.500,- (97,11%). Hasil kegiatan ini adalah tersedianya sumberdaya manusia tamatan SLTA maupun Sarjana sebagai calon enterpreneuship yang dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan bagi 40 (empat puluh) orang tamatan SLTA dan Sarjana;
 - (4) Kegiatan Pelatihan Gugus Kendali Mutu (GKM) dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.190.800.100,- dan terealisasi sebesar Rp.190.328.225,- (99,75%). Hasil kegiatan ini adalah pelatihan gugus kendali mutu bagi para IKM untuk 30 (tiga puluh) orang pengelola IKM sehingga pengetahuan tentang gugus kendali mutu para IKM tersebut meningkat;

- (5) Kegiatan Bantuan Kemasan dan Alat/Mesin Pengemasan untuk IKM Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.375.516.000,- dan terealisasi sebesar Rp.353.760.600,- (94,21%). Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya bantuan alat kemasan berupa peralatan sealer dan kemasan sebanyak 30 (tiga puluh) unit untuk 30 (tiga puluh) IKM dan tersedianya tenaga pendamping sebanyak 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk mendampingi para IKM dalam hal pengemasan produk.

Pembangunan bidang industri memiliki potensi yang sangat sentral. Dalam rangka mengantisipasi perdagangan global, usaha industri harus dikembangkan mengarah kepada terciptanya hasil produksi yang memiliki keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar. Disisi lain pengembangan industri harus berbasis pada pemanfaatan potensi sumber-sumber daya daerah termasuk hasil produksi sector primer, sumberdaya alam, teknologi maju dan tepat guna, serta berwawasan lingkungan. Pembinaan diutamakan kepada pengembangan usaha industri berskala rumah tangga dan kecil yang dalam kenyataannya dapat menyerap tenaga yang cukup besar. Dalam rangka mengefektifkan pengembangan perlu dikembangkan klaster-klaster industri dan pola kemitraan usaha. Pengembangan komoditas diarahkan pada mempertahankan komoditas unggulan yang ada, pengeseran komoditas unggulan menjadi andalan. Dalam rangka mendukung iklim usaha yang kondusif, secara bertahap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) harus dilaksanakan secara konsekuen.

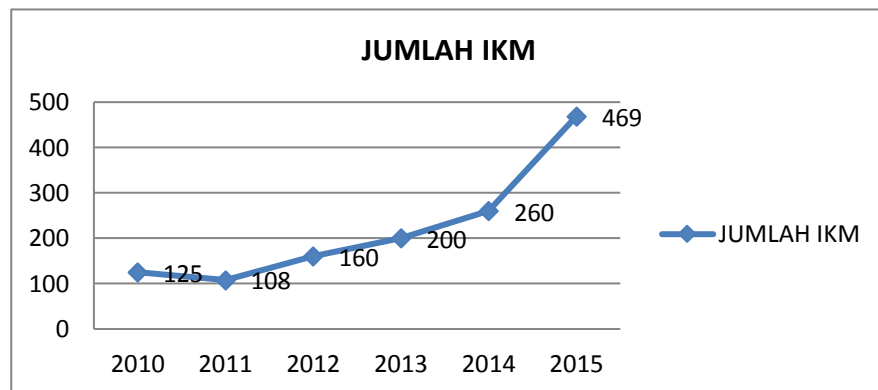
Tabel 4.68 : Jumlah IKM Di Kabupaten Bintan Tahun 2014 – 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Industri	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Tenaga Kerja
1	Teluk Bintan	30	32,340,000	90
2	Seri Kuala Lobam	56	75,460,000	118
3	Bintan Utara	70	21,836,000	215
4	Teluk Sebong	26	32,436,000	80
5	Bintan Timur	100	718,750,000	275
6	Bintan Pesisir	22	63,602,000	67

7	Mantang	31	106,722,000	62
8	Gunung Kijang	64	245,784,000	192
9	Toapaya	56	69,818,400	103
10	Tambelan	14	58,282,000	52
2015		469	2,525,030,400	1254
2014		260	2,525,030,400	595

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2016

Grafik 4.79 : Jumlah IKM Di Kabupaten Bintan Tahun 2010 – 2015



Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2016

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk;
- Terbatasnya penguasaan teknologi serta
- Kurangnya pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja.

2) Permasalahan

- Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan bagi para IKM untuk meningkatkan pengetahuan tentang manajemen usaha yang baik;
- Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi yang mendorong pemahaman dan manfaat legalitas, standarisasi dan sertifikasi produk.

4.2.7. Urusan Perdagangan

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kedua** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Sosial adalah sebagai berikut : Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 9.01 %;

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri

a. Pelaksanaan Program

(1) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.120.300.000 dan realisasi sebesar Rp.117.751.340 (97,88%). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan barang antara lain :

1. Berstandar SNI label berbahasa indonesia,
2. Elektronik, petunjuk penggunaan manual dan jaminan garansi (barang elektronik).
3. Pencantuman masa kadaluwarsa khusus makanan dan minuman, kosmetika dan obat-obatan.
4. Pengawasan pendistribusian barang meliputi pengawasan barang yang diatur tata niaganya dan barang dalam pengawasan seperti miras, pupuk bersubsidi, gula rafinasi, gas dan bbm bersubsidi
5. Pengawasan barang yang dilarang beredar meliputi pengawasan barang berbahaya. Seperti zat pengawet boraks, pc ball (bahan untuk blasting (industri perkapalan) dan barang yang menyangkut K3. Keselamatan dan kesehatan
6. Pengawasan barang yang dilarang ekspor dan impor
7. Pengawasan Perizinan dan Pergudangan
8. Pengawasan jasa meliputi :
 - a) Pengawasan cara menjual
 - b) Pengawasan Iklan
 - c) Pengawasan potongan harga (diskon)
 - d) Pembayaran barang dan jasa dengan Rupiah.

Dari tahun 2011 terkait dengan pengawasan Barang dan jasa berlabel SNI Wajib sudah dilaksanakan pengawasan untuk 9 Kecamatan dengan dengan jenis barang sebanyak 93 jenis, hingga tahun 2015 meningkat menjadi 112 barang. Sedangkan untuk yang tidak wajib SNI telah mencapai 8.000 jenis. Untuk pengawasan barang yang dilarang impor meliputi barang-barang yang dipergunakan untuk kebutuhan pasar domestik baik konsumen langsung maupun tidak langsung seperti elektronik, garmen, makanan dan minuman, mainan anak-anak, sepatu dan alas kaki. Serta larangan impor untuk barang bekas.

Untuk pengawasan barang yang dilarang ekspor meliputi hasil alam yang tidak dapat diperbaharui contoh bahan tambang dan barang-barang lain yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dalam negeri. Instabilitas ekonomi sosial dan budaya serta politik berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

- (2) Sosialisasi Perlindungan Konsumen, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.120.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.96.189.558 (80,16%). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan maksud memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan masyarakat (konsumen) terhadap hak dan kewajibannya masing-masing sehingga terciptanya iklim usaha yang kondusif antara pelaku usaha dan pengguna barang yang diperdagangkan baik barang dan jasa. Kegiatan ini dilaksanakan diikuti 60 peserta dari 9 Kecamatan dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan RI. Dengan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha yang cukup tinggi terhadap perlindungan konsumen maka akan menciptakan iklim usaha yang

kondusif. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing sehingga terjadinya kesenjangan dan tindak pidana terjadi di bidang perdagangan di bidang perlindungan konsumen dapat diminimalisir. Pengaruh signifikan akan terjadi terhadap kepuasan konsumen dari layanan yang diberikan oleh pelaku usaha dan peran pemerintah.

- (3) Pengawasan dan Pengamanan Barang Kebutuhan Pokok Dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.366.800.000,- dan realisasi sebesar Rp.354.094.800 (96,54%). Kegiatan ini terdiri dari :
 - a. Kegiatan pengawasan 9 bahan pokok antara lain monitoring harga dan pemantauan kesediaan barang/stok yang dilaksanakan secara periodik dan berkala di 10 Kecamatan Kabupaten Bintan.
 - b. Kegiatan operasi pasar (pasar murah) pada saat hari besar keagamaan seperti bulan ramadhan menjelang lebaran yang dilaksanakan pada 10 Kecamatan di Kabupaten Bintan.
 - c. Kegiatan mempublikasikan daftar harga kebutuhan 9 bahan pokok melalui media cetak.
- (4) Sosialisasi Undang-undang Perdagangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.85.240.000,- dengan realisasi sebesar Rp.79,710,500 (99,64%). Kegiatan ini mengundang 25 orang pelaku usaha sektor mikro dan kecil dari 9 Kecamatan yang berpotensi untuk meningkatkan usaha dan pemasaran sehingga dapat berorientasi ekspor. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang regulasi prosedur ekspor dan impor yang diterapkan oleh Pemerintah RI baik itu yang ada di dalam kawasan FTZ maupun yang berada diluar kawasan FTZ, dengan kegiatan ini diharapkan mampu mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan produksinya baik kualitas maupun kuantitas

sehingga mampu diterima di pasar domestik, regional, maupun internasional sesuai dengan permintaan pasar. Dalam kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan RI yang dilaksanakan selama 2 hari.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Ruang lingkup perdagangan yang cukup luas dan banyak permasalahan yang dihadapi serta anggaran yang minim sehingga masalah yang dihadapi cukup rumit dan kompleks.
- b. Kurangnya sumberdaya manusia yang terlatih dan bersertifikasi terutama dalam hal kelancaran pengawasan yang diatur dengan Undang-Undang dan Peraturan.

2) Solusi :

- a. Penambahan Anggaran guna terciptanya keseimbangan antara input dan output yang dihasilkan.
- b. Penambahan sumberdaya manusia yang terlatih dan bersertifikasi dalam menunjang pengawasan dengan cara mengirimkan pegawai ke Pusdiklat yang diselenggarakan oleh Kementrian Perdagangan RI.